

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menurut unit analisis dan definisi operasional yang telah ditetapkan, ditemukan adanya kecenderungan keberpihakan pada setiap judul berita *Kompas* terkait kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah dari total berita *Kompas* sebanyak 35 judul berita. Selain itu ditunjukkan dengan tidak terpenuhinya seluruh unsur ketidakberpihakan yang diharapkan sesuai dengan teori objektivitas Westerstahl, karena dari tujuh unsur pengukuran *impartiality* yang termasuk dalam kategori *balance dan neutrality* menunjukkan indikasi ketidakseimbangan dan ketidaknetralan pemberitaan *Kompas* terkait kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah . Pada hasil evaluasi dari unit analisis, *Kompas* masih mengarahkan pembaca secara konsisten ke arah tertentu. Adanya penilaian negatif yang menonjol bagi pemerintah dan aparat keamanan sehingga mampu mengarahkan pembaca dalam membuat penilaian yang sama.

Terkait dengan asumsi Dewan Pers (Rahayu, 2006:147), bahwa imparsialitas dalam memberitakan suatu peristiwa hendaknya didasarkan pada lebih dari satu perspektif dan diharuskan menampilkan informasi dari semua pihak yang terlibat sehingga pembaca mampu dengan mudah menemukan kebenaran. Maka peneliti menyimpulkan berdasarkan rumusan pada penelitian ini, bahwa *Kompas* sudah berupaya menerapkan imparsialitas, dibuktikan dengan tingginya presentase pemberitaannya yang multi sisi. Namun penerapan

imparsialitas *Kompas* belum sepenuhnya diterapkan pada pemberitaan terkait kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah.

B. Saran

Pada proses analisis penelitian ini, peneliti banyak mengalami kesulitan dalam menentukan ada tidaknya dimensi *balance* dan netralitas yang terdapat pada teks. Karena peneliti harus menghubungkan kata demi kata dan kalimat demi kalimat. Kemudian peneliti harus mengkaji secara mendalam keterkaitan masing-masing fakta yang ada dalam teks. Peneliti berulang kali melakukan analisis terhadap 35 judul berita terkait kerusuhan di Temanggung Jawa Tengah, dan kembali membaca definisi operasional sebagai acuan dalam analisis teks. Hal itu peneliti lakukan untuk mendapatkan hasil yang paling akurat. Perhitungan kuantitatif data dari hasil analisis yang peneliti lakukan pun banyak mengalami perubahan, hal ini terjadi karena banyaknya faktor yang mempengaruhi baik teknis atau pun pemahaman peneliti yang semakin kuat berdasarkan teori yang ada.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menyadari adanya kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu peneliti harus lebih cermat membaca dan menghubungkan makna kalimat dengan teks secara keseluruhan. Selain itu, seorang peneliti harus benar-benar memahami teori yang digunakan sebagai acuan penelitian dan kecermatan pada proses pengukuran unit analisis.

Pada penelitian ini, penulis mengetahui bahwa penelitian baik imparsialitas atau pun keberpihakan pers pada surat kabar *Kompas* sudah pernah dilakukan. Penelitian ini merupakan upaya peneliti untuk menjawab kontroversi

dari masyarakat khususnya Forum Umat Islam Bersatu Temanggung yang menyebutkan bahwa pada pemberitaan kerusuhan Temanggung, korban atau menurut pandangan forum tersebut adalah Islam, justru direpresentasikan sebagai pelaku. Namun dalam pemberitaan di *Kompas* memiliki sikap lain, dimana representasi korban ialah kaum minoritas, sedangkan yang disalahkan dalam kasus ini adalah pemerintah. Hal ini juga menjawab adanya kebijakan redaksi *Kompas* yang tidak memihak salah satu golongan agama. Berdasarkan fakta dan data yang didapatkan dari hasil penelitian, *Kompas* berhati-hati dalam memberitakan terkait isu SARA.

Peneliti berharap bagi penelitian selanjutnya yang menyangkut pemberitaan isu SARA, mampu membandingkan pemberitaan - terkait SARA yang terjadi di Indonesia pada berbagai periode untuk mengetahui konsistensi penerapan profesionalitas media. Hal ini menarik karena banyaknya yang muncul dan terus bertambah dan mendominasi pemberitaan media di Indonesia. Diharapkan penelitian seperti ini juga mampu berguna untuk memecahkan inti permasalahan - terkait multikultural yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Effendi, Onong Uchjana. 1989. *Kamus Komunikasi*. Jakarta: Mandar Maju
- Eriyanto. 2007. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS
- HAM, Musahadi. 2007. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia: Dari Konflik Agama hingga Mediasi Peradilan*. Semarang: Walisongo Mediation Centre
- Hill, David T. 2011. *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Keller, Anett. 2009. *Tantangan dari Dalam: Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung
- Krippendorff, Klaus. 1993. *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Tekhnik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Preneda Media
- McQuail, Denis. 1992. *Media Performance: Mass Communication and The Public Interest*. New Delhi: Sage Publications
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Rahayu. 2006. *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*. Jakarta: Krayon Grafika
- Singarimbun, Masri., dan Sofian Effendi. (ed). 1995. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES
- Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Analisis Framing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Lina, Gabriela P. 2012. *Keberpihakan Pers dalam Pemberitaan mengenai pernyataan Paus Benediktus XVI tentang Islam di Kompas dan Republika*. Sarjana Komunikasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

Data Internet

Forum Umat Islam Bersatu Temanggung. 2011. *Buku Putih Kronologi Kerusuhan di Temanggung*. (diakses 12 Maret 2012) dari <http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=17724/>

Permatasari, Widuri. 2005. *Keberpihakan Media Cetak Dalam Pemberitaan Kenaikan Harga BBM*. Universitas Kristen Petra. (diakses 6 Juni 2012) dari <http://digilib.petra.ac.id/viewer.php>

Data Koran

Harian *Kompas* dari tanggal 18 September 2006, 9 Februari 2011, 10 Februari 2011, 14 Oktober 2011 dan 30 Oktober 2011.

Harian *Kedaulatan Rakyat* dari tanggal 24 Mei dan 24 Juni 2011.

Harian *Republika* tanggal 9 Februari 2011.



LAMPIRAN

KERUSUHAN

Dalam Kepanikan, Ada Titik Solidaritas

Tiga mobil yang terbakar di garasi halaman Gereja Pantekosta di Ekuatoria di Jalan S. Parman, Tembungung, Jawa Tengah, Selasa (8/2) petang, menjadi saksi bisu kemarahan massa yang tidak puas atas vonis terhadap terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Antonius Richmond Bawengan, di Pengadilan Negeri Tembungung.

Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPII) Tembungung, Andrea M Asa, mengatakan, ketika puluh-

an orang menyerbu gereja, di dalam lingkungan gereja terdapat tujuh pekerja, termasuk ibu dan adiknya yang tinggal di rumah di belakang gereja.

"Massa mendobrak pintu gerbang yang dijaga polisi dan aparat kesamail (komando rayon militer). Mereka juga masuk ke halaman belakang kemudian merusak dan membakar mobil itu. Saat itu, semua kepalatan karena halaman belakang gereja tak ada pintu keluar" ujar Andrea sambil menunjukkan mobil yang dibakar massa.

Saat tegang itulah, api berkehan besar seiring dengan terbakarnya mobil. Ketika api membesar, sejumlah pekerja yang petus asa tiba-tiba melihat ada beberapa warga yang tinggal di belakang gereja datang mengulurkan bantuan.

Warga di belakang gereja yang tinggal di Kelurahan Butuh, Kecamatan Tembungung

Kota, membantu evakuasi orang-orang yang terjebak di gereja. Karena halaman gereja dan kampung terpisah sungai, warga menggunakan tangga untuk membantu mengevakuasi warga yang terjebak. Alhasil, orang-orang yang ada di dalam gereja itu pun selamat.

Ketua RT 03 RW IV Kampung Butuh, Penjol, mengatakan, saat mengetahui gereja tersebut dibakar, warga spontan membantu evakuasi orang-orang dari kompleks gereja itu.

"Kami hanya ingin menyelamatkan supaya mereka tidak menjadi korban jika. Mereka selama ini hidup rukun dengan warga di sini," ujar Penjol.

Ketua RW IV Kampung Butuh Muh Yafro menambahkan, pengurus gereja aktif dalam pertemuan dengan warga pada

(Borobung ke hal 15 kol 1-3)

Dalam Kepanikan, Ada Titik Solidaritas

(Sambungan dari halaman 1)

tanggal 16 setiap bulan. Kalau ada arisan kampung, warga pengelola gereja juga hadir. Sebaliknya, warga kampung juga hadir apabila pertemuan giliran berupa arisan warga RT 03 bertempat di rumah Andrea M Asa.

GPDI tersebut adalah salah satu dari tiga gereja yang dirusak dan dibakar dalam amuk massa pada Selasa lalu. Dua gereja lainnya adalah Gereja Bethel Indonesia (GBI) serta Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Temanggung.

Warga di sekitar GBI juga membantu memadamkan api yang berkebar di pos satpam dan eram sepeda motor di kompleks gereja tersebut. Gereja ini berada satu kompleks dengan Sekolah Kristen Shekinah di Jalan Supena, Kelurahan Jampiros, Temanggung.

Ratusan orang dari kelompok massa mengamuk di lingkungan kompleks sekolah yang hari itu siswanya diliburkan. Petugas sekolah, Sony Zubulan, mengatakan, ratusan orang merusak pos satpam dan mengobrak-abrik kantin. Massa juga merusak tiga ruang kelas di kompleks sekolah yang terdiri dari *playgroup*, TK, SD, SMP, dan SMA tersebut.

"Petugas satpam dibantu polisi dan anggota TNI yang berjaga tidak mampu menahan aksi massa itu," ujar Sony.

Sejumlah warga yang berkumpul di depan Sekolah Kristen Shekinah menyebarkan perusakan rumah ibadah dan sekolah itu. Kejadian itu juga menyebabkan warga tidak nyaman.

"Masyarakat Temanggung cinta damai. Kalau ada aksi-aksi massa yang merusak, pasti dilakukan pihak dari luar," ujar

Daryono, warga Temanggung.

Sejak awal ada kekhawatiran akan terjadi amuk massa dalam sidang kasus dugaan penistaan agama di PN Temanggung karena pada persidangan sebelumnya nyaris terjadi amuk massa. Untuk itu, sekolah-sekolah yang satu kompleks dengan gereja meliburkan para siswa.

Pengurus Gereja Santo Petrus dan Paulus juga khawatir ada amuk massa. Oleh karena itu, meski gereja bersebelahan dengan Markas Polres Temanggung, pada Senin lalu pengurus gereja tetap meminta bantuan pengamanan kepada polisi.

Oleh karena itu, Sulaiman, Sekretaris Kantor Paroki, mengatakan, ia tidak menyangka jika gerejanya juga ikut diserang. Waktu massa masuk ke gereja, ia dan dua temannya berlindung di kamar mandi. Sedangkan Bomo Sadana yang berada di gereja berhadapan dengan massa yang merusak gereja. "Kacamata Bomo pecah," ujarnya.

Warga menyesalkan

Tukang ojek yang *anggotai* di Kaloran, Temanggung, Hari, menyesalkan aksi massa yang menimbulkan kerusakan tersebut. Hari mengatakan, masyarakat sudah capai setelah beberapa tahun lalu ada aksi unjuk rasa massa untuk memonumenkan Bupati Totok Ary Prubowo (2004-2005).

Namun, ternyata kerusuhan terjadi lagi dan kali ini menimbulkan kerusakan sejumlah bangunan. Aksi itu meranaskan Kabupaten Temanggung yang selama ini dikenal sejuk dan peraih Piato Adipura lebih dari delapan kali pada masa Orde Baru.

Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Wilayah Jateng Ahmad Majidun juga menyesalkan terjadinya aksi rusuh oleh sekelompok orang tersebut.

Untuk itu, pihaknya meminta agar jajaran GP Ansor turut menegah terlungunya peristiwa perusakan rumah ibadah dan fasilitas publik, dengan alasan apapun.

Oleh karena itu, sebagai solidaritas sesama umat beragama, Rahn ini puluhan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) siap membantu membersihkan puing-puing akibat kerusakan di sejumlah gereja di Temanggung. Aksi ini adalah hasil koordinasi pengurus GP Ansor Jateng dengan jajaran pengurus GP Ansor se-wilayah Kedu.

Amuk massa itu tak hanya membuat Temanggung mececah, tetapi juga menyebabkan urat nadi ekonomi masyarakat lumpuh pada hari itu. Di Pasar Temanggung, misalnya, pasar induk yang berada di jantung kota Temanggung yang semula pada pagi hari ramai, pada pukul 10.00 mendadak "berhenti".

Kerusuhan yang diperkirakan melibatkan 800-1000 orang yang diduga dari luar kota Temanggung tersebut, menimbulkan ketakutan sehingga toko, kios, dan pusat perdagangan tutup. Pedagang memilih menutup toko mereka karena khawatir terjadi penjarahan.

Bupati Temanggung Hasyim Afandi mengimbau warga agar tenang serta tidak terpancing isu-isu yang memprovokasi dan merusak ketenangan kehidupan warga Temanggung.

Ya, semoga kota Temanggung yang nyaman ini segera kembali sejuk dan kondusif.

(WID/SUN/EGI/WEN)

Negara Gagal Lindungi Warga

Massa Merusak Gereja di Temanggung

TEMANGGUNG, KOMPAS – Setelah terjadi di Cikemisk, Pandeglang, Banten, Minggu (9/2), anarkis massa kembali terjadi pada Selasa lalu di Temanggung, Jawa Tengah. Ratusan orang mengancam, menobatkan, dan merusak tiga gereja serta beberapa kendaraan roda empat dan roda dua.

Pada dua peristiwa yang terjadi hanya berjarak sehari itu, anarkis seperti tidak berdaya menghancurkan ketertarikan keamanan massa. Sejumlah kalangan yang menuntut negara gagal melindungi warganya. Mereka tidak ada bakat jasa, aksi yang dilakukan ratusan orang di Temanggung itu seharusnya bisa diantisipasi karena sudah terjadi untuk ketiga kali. Namun, penanganan aparat kepolisian di beberapa tempat sudah

dan tidak-ditilik tentunya itu terjadi tidak mampu menahan serangan massa. Aksi massa mulai terjadi sekitar pukul 10.00 saat berlangsung persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa Anthonis Ribumard Basong di Pengadilan Negeri Temanggung. Keributan berasal saat majelis hakim yang dibarengi dua juri memutuskan putusan yang menghukum terdakwa asal Jakarta itu dengan lima tahun penjara. Saat mendengar vonis lima tahun, massa yang sudah sejak awal berada di dalam ruang sidang langsung berontak dan berusaha menubruk tempat duduk terdakwa. Akibat keributan tersebut, majelis hakim tidak sempat mengumumkan putusan. Polisi langsung mengamankan terdakwa dan kini terdakwa berada di Semarang. Mengalami kejadian tidak-lagi di pengadilan, massa langsung melakukan aksi pengalihan sehingga kaca jendela pecah dan yodium rusak. Pegawai PN Temanggung pun berburu menyalakan dan diiringi cara memanjat tembok. Salah seorang pegawai juga terkena serangan batu dari kaca pecah. Polisi yang sudah berjasasapak

(Berlanjut ke hal 15 Kol 4-7)

Kerusuhan Temanggung



Arak massa dari PN Temanggung (Jl. Jend. Sudirman) sekitar 2 kilometer dari Gereja Bethel)

07.00	Polisi dikerahkan di depan gedung Pengadilan Negeri Temanggung.
09.39	Massa langsung menyerbu masuk ke ruang sidang setelah pemasangan larangan.
10.00	Massa di luar merobek gedung pengadilan.
10.20	Sewah-truh pengalihan massa dibakar massa.
10.30	Massa berhasil dipaksa mundur ke berbagai arah.
10.36	Ribeca berangkat ke arah perant. 10.36
11.00	Massa merusak tiga bangunan gereja di Jalan Sudirman, S. Purman, dan Supito.
12.00	Polres mengamankan keributan di beberapa wilayah, terutama di Jalan Sudirman.
13.00	Situasi berangsur normal. Massa di depan gedung pengadilan mulai membenturkan diri.
14.15	Siswa keamanan mulai terlambat.
16.40	Polisi menangkis satu orang dari di antara di Polres Temanggung.
16.46	Aktivitas peredaran mulai normal kembali.
17.25	Polisi memproses lima orang saksi.

Sumber: Pengadilan Negeri Temanggung

Negara Gagal Lindungi Warga

(Sambungan dari halaman 1)

pagi di kompleks pengadilan menghibur massa keluar dari ruang sidang dan halaman, tetapi hal ini justru berakibat fatal. Di Jalan Sudirman, depan PN, massa menggulingkan dan membakar dua mobil Satuan Pengendalian Masyarakat (Palmas) yang di parkir di pinggir jalan depan pengadilan.

Mereka juga merusak sepeda motor yang diparkir di sekitar gedung pengadilan, dan di antaranya milik wartawan.

Massa kemudian berpecah menuju sejumlah tempat ibadah dan melakukan perusakan.

Gereja Bethel Indonesia di Jalan Sugoto menjadi sasaran pertama. Mereka merusak kantin TK dan kelompok bermain Shekinah serta merusak gedung pertemuan Graha Shekinah. Empat sepeda motor dibakar.

Massa kemudian membakar gedung Gereja Pentekosta di Indonesia yang berdekatan dengan pasar kota Temanggung.

Gereja Santo Petrus dan Paulus juga tak luput dari amuk massa. Melekas Polres Temanggung juga dirusak.

Massa di depan pengadilan baru-baru pukul 13:00. Mereka kemudian melanjutkan aksi berkeliang ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Temanggung.

Dipicu SMS

Saat amuk massa berlangsung, suasana di pusat kota Temang-

gung memekam. Pagar dan pintu karton, pertokoan, serta rumah-rumah ditutup rapat karena khawatir diserang. Situasi mulai mereda sekitar pukul 15:00. Namun, pengujian ketat tetap terlihat di kawasan kantor PN, markas Polres, gereja-gereja, dan sejumlah tempat. Ribuan polisi terus berjaga di sejumlah titik.

Dalam jumpa pers Selasa malam, Kepala Polda Jawa Tengah Irfan Edward Arifonang menyatakan telah memeriksa lima saksi, tetapi belum menetapkan tersangka. Hasil sementara pemeriksaan, aksi massa itu dipicu oleh SMS yang mengajak mereka untuk menghadiri sidang penistaan agama dan berdakwah. Edward menegaskan, kasus ini bukan masalah antaragama.

Hingga pukul 21:30, Edward dan Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen Langgeng Subityono Widodo masih tetap berada di Temanggung untuk memantau kondisi di lapangan. Personel dari Polres Temanggung, Wonosobo, Pekalongan, Brimob Polda Jateng, dan Batalyon Armed Magelang tetap siaga.

Sebelumnya, Arifonang menyatakan, amuk massa ini dipicu ketidakpuasan massa atas vonis yang menghukum Antonius.

Ia mulai terjadi dalam kasus penistaan agama sejak Oktober 2010 karena mengemukakan dukungan stoisilan yang berisi permintaan agama, baik terhadap agama Islam maupun Kristen.

Menjawab pertanyaan bahwa

kelompok massa ini sudah tiga kali melakukan aksinya, Arifonang menjawab, pihaknya berkonsentrasi mengamankan kota.

Harus tegas

Menyusul terjadinya aksi massa itu, sejumlah pihak mengevaluasi ketidakhadiran negara dalam melindungi warganya.

Pernyataan serupa, misalnya, datang dari PBNU dan tokoh-tokoh lintas agama yang menggelar pertemuan pada Selasa malam.

Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang Romo Aloysius Budi Purmono juga meminta pemerintah tegas menindak setiap kekerasan yang dilakukan sekelompok orang dengan mengatasnamakan agama.

Romo Budi mengatakan, pemerintah terlalu lama membiarkan peristiwa semacam itu terjadi tanpa ada penyelesaian. Romo Budi mengimbau umat beragama untuk tidak terprovokasi kejadian tersebut.

Perserikatan Gereja-gereja di Indonesia juga mengecam keras tindak kekerasan di Temanggung itu. "Masalahnya, kegagalan negara dalam memberikan perlindungan ini sering terjadi," kata Sekretaris Eksekutif Bidang Dialogia PGI Jerry Supandiawan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansur Nusrat Wahki menyatakan, pembakaran



DK 0009 4804

tempat ibadah adalah tindakan biadab dan jauh dari nilai dan ajaran agama. Untuk itu, ia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengawasi kinerja

Kepala Polisi berikut jajarannya.

Ansur bahkan sudah mengorganisir jajarannya, berikut Basis-an Ansur Serbagama (Banser), di kawasan Kedu bekerja sama dengan aparat keamanan dan elemen masyarakat lain untuk ikut menajaga fasilitas publik dan tempat ibadah.

Pertanyaan tentang kegagalan negara mengamankan warganya juga datang dari Sekjen PDI-P Tjahjo Komolo dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santosa. Namun, Kepala Polisi Jenderal (Pol) Timor Pradopo menepis tuduhan itu.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Menko Polhukam Djoko Supriyanto, mengecam tindakan anarkis di Temanggung itu. Presiden juga menginstruksikan Polda Jateng segera mencari pelaku tindakan anarkis tersebut.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta Polri menyelidiki kemungkinan adanya pihak-pihak yang mendorong adanya kekerasan untuk merusak keamanan dan ketertiban publik.

(UPI/EGJ/WHO/SON/WEN/INA/DK/CAS/NWO/TR/A/INU/IAM/PER)

KERUKUNAN

Agama Tak Ajarkan Kekerasan

JAKARTA, KOMPAS — Agama apa pun sejatinya menekankan pentingnya perdamaian dan menghindari kekerasan pada pemeluknya. Jika ada ajaran kekerasan dari agama, kemungkinan besar itu merupakan tafsir yang menyimpang.

Hal itu terungkap dalam dialog "Penguatan Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia" oleh Sahabuddin Institute di Jakarta, Selasa (8/2). Acara ini menampilkan pembicara antara lain Sekretaris Jenderal PB Nahdlatul Ulama KH Marsudi Syuhud, penasihat Sahabuddin Institute KH Muh Syibli Sahabuddin, dan anggota DPD dari Provinsi Bali, I Wayan Sudirta.

Syibli menjelaskan, semua agama pada dasarnya mengajarkan pemeluknya membangun perdamaian. Perbedaan antarmanusia dan kelompok merupa-

kan hukum alam yang mutlak adanya. "Agama sejatinya tidak pernah mengajarkan kekerasan, dan tidak pernah membenarkan kekerasan. Kalau ada ajaran kekerasan yang diusung dari agama, pastilah itu tafsir yang keliru," katanya.

Agama juga mengajarkan manusia untuk menerima segala perbedaan sebagai rahmat atau anugerah. Jika manusia dikelola dengan baik, segala perbedaan tersebut justru bisa memperkuat hubungan antarmanusia. "Perbedaan itu rahmat yang inilah nikmat kehidupan manusia," kata Syibli.

Hal serupa diungkapkan Wayan Sudirta. Perbedaan dan keberagaman di Indonesia bisa menjadi sumber kekuatan apabila dikelola dalam kebhinekaan kuat untuk kemajuan, tetapi bisa disulut menjadi bentrokan antar-

kelompok jika tidak ditangani dengan baik.

Jika dipelajari, sesungguhnya akar masalah dalam bentrokan bermassa agama tidak murni dari masalah agama. Banyak faktor lain yang menjadi penyebab gesekan, tetapi disalahkan seolah-olah leyat konflik agama. Padahal, konflik sesungguhnya bersumber dari soal hukum, politik, dan ekonomi. Elite agama dan politik semestinya tidak menjadikan agama sebagai komoditas politik.

Marsudi Syuhud berharap pimpinan agama hendaknya menekankan semangat persaudaraan demi membangun peradaban bersama yang saling menghargai. Kalau saja kelompok agama berdayagah, seharusnya hal itu dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, kekhawatiran, dan teladan yang baik. (IAM)

Polri Tetapkan Satu Tersangka

Ahmadiyah Mengadu ke Komnas HAM

SERANG, KOMPAS – Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan seorang tersangka, berinisial U, dalam kasus kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Kampung Peudeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. U disebut berperan dalam membunuh warga Ahmadiyah dan menyuruh pembakaran mobil.

Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, Selasa (8/2), masih berlanjut. "Ada satu tersangka dan tentu akan berkembang. Namanya (inisialnya) U," ujar Kepala Polisi Jenderal (Pol) Timur Pradopo di Serang, Banten, Selasa.

Timur ditemui sesaat pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Garnawan Fauzi, Menteri Agama Suryadharma Ali, Gubernur Banten Ratu Atut Chusiyah, serta pejabat daerah dan tokoh agama di Banten.

Menurut Kepala Polda Banten Brigadir Jenderal (Pol) Agus Kusnadi, U berperan sebagai pembunuh dan menyuruh membakar mobil. U kini ditahan di Polres Pandeglang. Polisi sudah memeriksa 12 saksi.

Namun, di Jakarta, Selasa, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam, mengatakan, Polri menetapkan dua tersangka terkait insiden Cikeusik, yakni berinisial A dan U. Selain itu, Polri juga membentuk tim untuk memeriksa prosedur pengamanan lapangan dalam menanggapi aksi kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga meminta Polri bergerak cepat menemukan pelaku kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Kekerasan itu sangat berbahaya karena merusak kebangsaan Indonesia yang majemuk.

"Kekerasan atas nama apa pun tak bisa dibenarkan. Karena itu,

polisi harus bergerak cepat. Siapa yang melakukan kekerasan, apalagi membunuh, harus segera diamankan, diadili," tutur dia.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman juga meminta Kepala Polri mengambil sikap tegas dengan mengambil langkah hukum terhadap pelaku kekerasan.

Agak sulit

Suryadharma mengakui, banyak yang menanyakan kenapa pemerintah tidak tegas dalam kasus Ahmadiyah. "Ada pertimbangan yang agak sulit untuk dikemukakan. Namun, ini bukan dibiarkan," kata Menteri Agama.

Menurut Suryadharma, pemerintah lebih memprioritaskan dialog. "Dengan demikian, saudara kita, jemaah Ahmadiyah itu bisa kembali menjadi Islam yang benar. Seperti di Banten, ada jemaah Ahmadiyah yang kembali, yakni di Desa Ciseveh, Kecamatan Cisuta. Jumlahnya 26 keluarga kurang lebih dari 50 orang. Ini kan positif," tuturnya.

Ia melanjutkan, "Pemerintah pada masa lalu lebih mengutamakan dialog agar mereka kembali. Insha Allah dalam waktu dekat akan ada keputusan yang akan diambil pemerintah, yang tepat sebagai solusi permanen."

Di Jakarta, tokoh agama meminta pemerintah melindungi semua warga, termasuk kelompok minoritas agama, seperti jemaah Ahmadiyah. "Sebagai warga negara, Ahmadiyah harus di-

lindungi. Mereka bukan penjahat negara. Jangan biarkan kekerasan terus terjadi," kata Sa'id Aqil Siradj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Tokoh agama juga meminta pemerintah bertindak tegas kepada siapa pun yang terlibat dalam kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah dan perusakan gereja di Temanggung (Jawa Tengah). Mereka harus ditindak tegas.

Mengadu ke Komnas HAM

Selasa, Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka meminta Komnas HAM menyelidiki kasus penyerangan dan teror terhadap Ahmadiyah. Ditengarai, penyerangan ini bersifat sistematis sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

Dalam pengaduan itu, JAI diwakili Sekretaris Pers Zafriullah Pontoh dan Mubariq Ahmad. Mereka ditemui Ketua Komnas HAM Idris Kasim yang didampingi anggota Komnas HAM, Nur Cholli dan Stanley Adi Prasetyo.

Mubariq menyebutkan, berantunnya serangan terhadap Ahmadiyah, seperti tiga kasus terakhir di Tasikmalaya, Mulasar, dan Pandeglang, terlibat ada pembunuhan. Indria Ferida dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menambahkan, sejak tahun 2001, ada gejala memanas serangan terhadap Ahmadiyah. "Ada juga impunitas karena tidak ada pelaku penyerangan yang diproses hukum secara tuntas," kata dia.

Idris mengatakan, Komnas HAM mulai menginvestigasi kasus ini. Investigasi dari yang bersifat regulasi ini akan menjerus ke yang lebih khusus untuk melihat kasus yang terkait.

QAM/ATO/CAS/EBR/
EDN/ANA/NTA/WHY

PEMERINTAHAN

Kerawanan Politik Jauhkan Ide Perombakan Kabinet

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun hingga kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih belum memberikan tanda-tanda, diperkirakan Presiden segera melakukan pergantian kabinet setelah kondisi politik dalam negeri cukup stabil.

Jika kondisi politik masih labil, Presiden dipastikan belum segera mengganti kabinet. Kondisi politik yang labil itu di antaranya pascainsiden Cikeusik, Pandeglang, serta kasus kekerasan di Tembungbung.

Demikian ditegaskan anggota Dewan Pembina Partai Demokrasi, Achmad Mubarak, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (8/2). "Seperti sekarang, Presiden Yudhoyono pasti mengutamakan keprihatiran dan bukan *reshuffle* kabinet. Berbagai kerawanan politik sekarang ini, menurut saya, akan semakin menjauhkan Presiden untuk melaksanakan *reshuffle*," kata Mubarak.

Selengkapnya, jika kondisi politik relatif stabil, Presiden diperkirakan akan segera mengevaluasi kabinetnya. "Kalau kondisinya semakin tenang dan tidak ada tanda-tanda peristiwa seperti Cikeusik, saya kira justru *reshuffle* akan semakin cepat. Namun, harus dihindari *reshuffle* jadi alat politik," lanjutnya.

Juru Bicara Kepresidenan Jullia Aldrin Pasha menepis informasi adanya desakan beberapa papol pendukung pemerintah yang memaksa Presiden memastikan ada-tidaknya pergantian kabinet akhir Februari ini.

Ketua Masyarakat Profesional Muda Indonesia Ismed Hasan Putra, yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Prihumi Indonesia, menyatakan, jika sampai akhir Februari ini Presiden tidak melakukan pergantian kabinet, momentum pelaku usaha untuk melakukan investasi dan ekspansi usahanya akan hilang (HAR)

PASCA-KERUSUHAN

Solidaritas Antaragama Pun Terus Tumbuh...

Aksi massa yang membakar dan merusak tiga gereja serta beberapa mobil dan sepeda motor di pusat kota Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (8/2), melihat menyusih kerukunan antarumat beragama di Tanah Air.

Namun, peristiwa yang menghadirkan ketakutan di masyarakat Temanggung itu juga menghadirkan solidaritas antarwarga ataupun antaragama.

Uluran tangan dan dukungan pun berdatangan. Gerakan Pemuda (GP) Ansor, misalnya. Sejak setelah kerusuhan di Temanggung, Rabi, Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Nusron Wahid bersama rombongan langsung mendatangi gereja-gereja yang dirusak massa. Selain memberikan dukungan moral, GP Ansor juga menawarkan tenaga anggota Ansor untuk membantu memperbaiki gereja yang dirusak massa.

Mereka juga menyatakan siap membantu mengamankan semua gereja di Kabupaten Temanggung. Berapa pun jumlah personel yang diminta, mereka siap. Bahkan, Nusron menegaskan, organisasinya siap di-kontak kapan saja oleh gereja. "Di wilayah Kedu saja kami memiliki puluhan ribu personel. Semua siap membantu kapan saja," ujarnya.

Saat berkunjung ke Gereja Katolik Santo Petrus dan Pa-

ulus, Nusron yang datang dengan mengenakan peci langsung berdialog dengan Romo Eulistyus MSF, romo paroki Gereja Santo Petrus dan Paulus, Tanpa gangguan, ia melihat kerusakan hingga ke bagian sekitar altar dan menyalami umat.

Dalam kesempatan itu Nusron mengatakan, pihaknya sudah sepakat dengan gereja untuk bersama-sama mengamankan kebebasan beragama dan memberikan edukasi tentang harmonisasi kebebasan beragama kepada publik. Hal ini untuk mengedukasi masyarakat agar tidak menganggap perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan.

Nusron mengemukakan kecewa atas kerusuhan yang terjadi pada Selasa lalu. "Aksi kerusuhan itu bodoh, tidak layak dilakukan oleh manusia, apalagi di bumi Indonesia yang sejak dulu menjunjung tinggi etika," ujarnya.

Di kalangan masyarakat Temanggung, aksi massa yang merusak dan membakar tiga gereja, meski menakutkan, justru memicu munculnya rasa persaudaraan mereka. Hal itu seperti yang ditunjukkan masyarakat di sekitar Gereja Pantekosta di Indonesia di Jalan S Parman, Temanggung.

"Gereja Pantekosta termasuk dalam wilayah kampung kami. Mengusik gereja sama saja seperti mengusik salah satu tetangga, dan mengganggu ketenangan di sini. Kami harus siap membantu jika terjadi apa-apa di sana," ujar Angga, tokoh pemuda di Kampung Butuh, Kelurahan Butuh, Kecamatan Temanggung.

Karena merasa gereja tersebut adalah "tetangga" satu

(Bersambung ke hal 15 kol 1-4)

Solidaritas Antaragama Pun Terus Tumbuh...

(Sambungan dari halaman 1)

Kampung, warga Kampung Butuh pun tidak tinggal diam ketika gereja mulai diserang ratusan orang dan nyawa tujuh jemaat di dalamnya terancam. Begitu mendengar kesulitan dari suara minta tolong dari dalam gereja, warga pun langsung memanjat tembok belakang gereja setinggi 2 meter, mengevakuasi umat yang masih berada dalam rumah pendeta, dan membimbing mereka keluar dengan menggunakan tangga yang dibawa warga dan dipasang di tembok.

Sebagian warga lainnya membawa air menggunakan ember, kemudian menyiram api yang membakar mobil, sepeda motor, pintu depan, dan sebagian ruangan di Gereja Pantekosta di Temanggung. Padahal, saat itu, sebagian massa masih berada di halaman depan gereja.

"Sebenarnya kami juga takut, khawatir kalau di sana bertempur massa. Namun, tentu saja, kami tidak mungkin tega membiarkan

orang lain terjebak, terancam dilajar massa di dalam gereja," ujar Sardiyono, warga lainnya.

Melihat tujuh jemaat Gereja Pantekosta di Temanggung yang gemetar ketakutan, warga pun segera menolong dan membawa ke rumah salah seorang warga, Pwanto Basuki.

Sardiyono, yang beragama Islam, mengatakan, tindakan penyelamatan tersebut dilakukan sebagai bentuk spontanitas warga menolong "tetangganya" yang kesusahan. Karena, menurut dia, Kampung Butuh tidak pernah mempersoalkan perbedaan agama karena warga kampung terdiri atas beragam agama.

Antisipasi kerusuhan

Pasca-kerusuhan tersebut, pemimpin Pondok Pesantren Al Munawar, Temanggung, KH Amin Wastoni mengatakan, untuk mengantisipasi agar kejadian yang sama tidak terulang, setiap organisasi kemasyarakatan dan ulama harus segera mengendalikan umatnya agar jangan sampai terpancing emosi

yang akhirnya merugikan diri sendiri.

"Sebagai seorang Muslim, kita tidak perlu membela agama dengan mengikuti aliran garis keras, dan melupakan hal-hal yang menyakitkan mereka yang berbeda agama," ujarnya.

Saat terjadi kerusuhan, Amin meminta anaknya, Sholahudin, untuk mengecek kerumunan massa dengan tujuan mengajak pulang santri jika ada di antara santri Pondok Pesantren Al Munawar terlibat di sana.

Prawoto, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Temanggung, mengatakan, kerusuhan atas nama agama pada Selasa lalu sungguh berbeda dengan konflik kemanusiaan beragama di Kabupaten Temanggung, yang sudah berlangsung begitu lama selama ini.

"Tidakkah saatnya Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan testimoni tentang kultur kehidupan di Kabupaten Temanggung. Saya tidak percaya kerusuhan pada Selasa kemarin dilakukan oleh warga Temang-

gung," ujarnya.

Sementara itu, umat Katolik di Gereja Santo Petrus dan Paulus juga menegaskan, selama ini tidak pernah ada masalah antara umat Katolik dan umat Islam di Kabupaten Temanggung.

Agung, salah seorang umat, mengatakan, dengan warga Nahdlatul Ulama dan GP Anshor misalnya, umat kerap kali bekerja sama, meminta bantuan mereka untuk mengamankan misa Natal dan Paskah, serta mengundang anggota dan organisasi tersebut untuk hadir pada perayaan ulang tahun Gereja Santo Petrus dan Paulus.

Bupati Temanggung Hasyim Afandi menyatakan prihatin dengan adanya kerusuhan yang berawal dari ketidakpuasan massa atas putusan hakim dalam sidang kasus dugaan penistaan agama tersebut. "Kami hanya terkenang imbas buruknya, yaitu ketakutan warga, lumpuhnya aktivitas masyarakat, dan rusaknya tiga gereja," ujarnya.

GGI/WHO/SUN/WENO

SBY: Bubarkan Ormas Perusuh

Delapan Tersangka Kerusakan di Temanggung

KUPANG, KOMPAS – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat penegak hukum agar mencari jalan secara sah dan legal untuk membubarkan organisasi massa perusuh ataupun kerumunan massa pembuat kerusakan. Sebab, demokrasi bukanlah butan rimba, tetapi harus ada aturan mainnya.

"Jaga kerukunan antarumat beragama. Jika ada kelompok atau organisasi resmi yang selama ini terus melakukan aksi kekerasan yang tak hanya meresahkan masyarakat luas, tetapi nyata-nyata banyak menimbulkan korban, penegak hukum agar mencari jalan yang sah atau legal, jika perlu dilakukan pembubaran atau pelarangan," kata Presiden pada peringatan Hari Pers Nasional Ke-63 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (9/2).

Pengawasan Presiden itu mendapat aplaus dari sekitar 2.000 hadirin. Presiden mengaku

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

BACA JUGA HAL 3

Media Massa Bersaing...

Ormas dan Kekerasan

"Jika ada kelompok dan organisasi resmi yang selama ini terus melakukan aksi kekerasan, maka kepada penegak hukum agar dikarirkan jalan yang sah atau legal, jika perlu dilakukan pembubaran atau pelarangan."¹

(9 Feb 2011)

Presiden
Susilo Bambang
Yudhoyono

Wakil Presiden Boediono

Maminta Kepala Polri untuk mengusut tuntas dan meningkatkan situasi keamanan di Temanggung dan kawasan sekitarnya pascakerusakan.

(9 Feb 2011)

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

"Tentu harus ada fakta dan bukti, baru kita bisa mengambil tindakan. Tanpa bukti dan fakta, organisasi tidak bisa dibubarkan begitu saja."²

(9 Feb 2011)

Menteri Hukum dan HAM Patrisia Akbar

"Membubarkan ormas tersebut bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, tidak semua ormas mendaftarkan dirinya secara resmi."³

(9 Feb 2011)

Menko Polhukam Djoko Suyanto

"Jika ada kelompok masyarakat atau organisasi apa pun yang melanggar UU, harus dibubarkan."⁴

(9 Feb 2011)

Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo

"Ini sudah pernah dibahas dan sudah diatur. Kalau ada fakta yang memenuhi, kita lakukan."⁵

(9 Feb 2011)

Samban Litbang Kompas

TOE
ANORE

SBY: Bubarkan Ormas Perusuh

(Sambungan dari halaman 1)

prikatin terhadap kasus kekerasan atas nama agama, sebagaimana terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten, dan Temanggung, Jawa Tengah, dalam waktu satu minggu lalu. "Kalau ini kita biarkan, Indonesia bisa *setback*, mengalami kemunduran ke era sebelumnya pada 1998-2003. Karena kondisi waktu itu sering terjadi dan di mana-mana dengan banyak korban. Untuk memilikikannya butuh waktu bertahun-tahun," katanya.

Kepala Negara menjelaskan, meski dalam era demokrasi kita menjunjung tinggi kebebasan berbicara dan berkumpul, kita tak boleh memberikan ruang untuk melakukan serangan, bahkan pembunahan. Semua jelas pelanggaran hukum.

Presiden mengingatkan, "Jika ada massa berkumpul dalam jumlah banyak, yang diketahui melakukan tindakan atau serangan kepada pihak lain, apa pun alasannya, semua itu perlu dibubarkan oleh aparat keamanan dan penegak hukum sesuai norma hukum dan demokrasi."

Presiden menegaskan, demokrasi tidak berarti hukum rimba, tidak ada aturan main. Semua ada aturan.

Kalangan pers, menurut Presiden, perlu mendukung upaya memperkuat kerukunan antarumat beragama di negeri ini. Kita harus mengungkap aksi kekerasan dari kelompok atau organisasi mana pun yang merobek atau menghancurkan kerukunan antarumat.

"Saya telah perintahkan polisi dan komando teritorial untuk bertindak *off out* dan menangkap semua pihak yang terlibat. Polisi harus berani menangkap siapa dituduh di balik kasus ini dan memberikan sanksi hukum se-timpal," ujar Presiden.

Sesuai acara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan

Keamanan Djoko Swanto menambahkan, pernyataan Presiden itu tidak mengarah pada kelompok organisasi tertentu. Jika ada kelompok masyarakat atau organisasi apa pun yang melanggar UU, harus dibubarkan.

Petua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD menilai, pernyataan Presiden tidak untuk membubarkan organisasi tertentu, tetapi menyebarkan kerumunan massa agitatif. Namun, ia mengakui, selama ini negara menunjukkan kelemahan sehingga menimbulkan kesan kalah terhadap kerumunan butalitas ini.

Menyusul Elemen Negeri Gamawan Fauzi menambahkan, organisasi masyarakat yang terbukti melakukan kekerasan harus dihapuskan. Namun, tentu harus ada fakta dan bukti, baru bisa diambil tindakan. "Yang punya fakta itu petugas di lapangan," katanya di Jakarta, Rabu.

Tanpa fakta dan bukti, menurut Gamawan, organisasi tak bisa dibubarkan begitu saja.

Petua Setara Institusi Hendardi mengingatkan, pemerintahan tidak bisa membubarkan organisasi massa. Hal itu tak sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah memeriksa pimpinan organisasi massa yang menunggang aspirasi intelektual dan aktif melakukan kekerasan.

Delapan tersangka

Dari Temanggung dilaporkan, sehari setelah anjak massa yang terjadi di pusat kota Temanggung, Kepolisian Daerah Jawa Tengah menetapkan delapan tersangka dalam kerusuhan yang terjadi Selasa. "Kami terus menyelidiki, mencari tahu apakah gerakan kerusuhan ini dilakukan massa yang dikoordinasi secara

sistematis atau spontanitas bebalah," ujar Kepala Polda Jateng Inspektur Jenderal Edward Ari-terwang, Rabu di Temanggung.

Delapan tersangka yang kini diamankan di Polda Jateng adalah NIY, AS, SD, MY, SF, AK, AZ, dan SM yang semuanya merupakan warga Temanggung. "Tersangka terbukti sebagai pelaku perusakan dan juga terlibat dalam mempersiapkan kerusuhan," ujar Edward. Delapan tersangka dituntut melakukan tindak pidana perusakan secara bersama-sama.

Kendati anjak massa berakhlak, tiga gereja yang dirusak, yakni Gereja Pantekosta di Indonesia, Gereja Bethel Indonesia, dan Gereja Santo Petrus dan Paulus, hingga Rabu masih dijaga aparat Polri dan TNI. Namun, aktivitas di kompleks gereja berlangsung normal.

Di Jakarta, Rabu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timor Pradopo mengakui, ada pihak yang menggerakkan massa saat anjak Temanggung untuk berkumpul di depan Pengadilan Negeri Temanggung Selasa, saat voting untuk Antonius Richmond Barweng yang didukung melakukan penistaan agama diputuskan.

"Dari hasil pemeriksaan terhadap seorang tersangka yang berkumpul di sekitar Pengadilan Negeri Temanggung bukan hanya dari Temanggung," kata Timor sesuai menanggapi laporan kepada Wakil Presiden Boediono. Polri masih menyelidiki kasus di Temanggung itu.

Semalam, Komisi VIII DPR mengesahkan rapat kerja dengan Kepala Polri dan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait kasus di Pandeglang dan Temanggung.

(KOR/ANS/BRIDARZE/WHO/
EPN/REGUSON/WEN/EKI/PRA/
ABR/ZALAND/LOK/
NWO/NA/DIR/NYA/TRI)



DK 0009 4808

TEKANAN MASSA

Hakim Diminta Tak Terpengaruh

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun aksi massa belakangan marak di sekitar pengadilan, hakim diminta untuk tidak takut, tetap independen, dan tidak tunduk terhadap tekanan massa. Hakim harus tetap memutus perkara berdasarkan keyakinannya berdasarkan pada rasa keadilan, tak mengikuti kehendak massa.

Seruan itu dikemukakan Juru Bicara Mahkamah Agung Hatta Ali, Rabu (9/2) di Jakarta. Aksi massa sempat terjadi di sejumlah pengadilan. Beberapa di antaranya adalah di Pengadilan Negeri Tembung pada saat pembacaan putusan dalam perkara penistaan agama serta Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Ariel "Peterson".

Terkait hal semacam itu, Hatta Ali mengungkapkan, MA hanya dapat meminta hakim untuk tak

mengikuti opini dan keinginan massa. Hakim tidak boleh terpengaruh. "MA juga tidak bisa mengintervensi materi perkara atau apakah harus dihukum berat atau ringan. Itu semua tergantung rasa keadilan hakim masing-masing," katanya.

Menurut dia, MA sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di Indonesia terkait dengan penanganan perkara-perkara sensitif dan rayan. Pengadilan diminta mempersiapkan diri dan meminta pengambaran kepada pihak berwajib.

Keprihatinan atas maraknya aksi massa yang berusaha mengganggu hakim juga diserukan Komisi Yudisial. Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh dan anggota KY Taufiqurrahman Syahuri dalam jumpa pers kemarin meng-

ungkapkan, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*). Hanya saja, hingga kini tidak ada sanksi pidana untuk tindakan tersebut. Undang-undang sama sekali tidak mengaturnya.

"KY sangat prihatin dengan kejadian seperti Tembung dari tempat lain di mana massa menekan hakim. Kenapa ini bisa terjadi? Karena belum ada perangkat hukum yang mematuhi seperti *contempt of court* jika ep-sak pengadilan atau menekan lembaga pengadilan itu sebagai tindak pidana," ujarnya.

Terkait hal itu, KY akan meminta pemerintah memasukkan ketentuan tentang penghinaan terhadap pengadilan ke dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUPA).

Ada Pola Insiden Kekerasan Massa

Pemerintah Dinilai Melakukan Pembiaran

JAKARTA, KOMPAS — Beberapa insiden kekerasan yang dilakukan kelompok massa kepada kelompok minoritas tampak sistematis dan berpola. Keganjilan lain ialah pembiaran oleh aparat penegak hukum atas tindakan main hakim sendiri tersebut.

Dernikian diungkapkan Ketua Presidium Ekam Sajana Katolik Indonesia Muliawan Margakana, Rabu (9/2), yang menyampaikan pernyataan bersama tokoh lintas agama di Jakarta. Kekerasan yang terjadi sistematis, polanya jelas, dan berjalan terus tanpa upaya tegas penegak hukum.

Frans Magnis-Suseno menambahkan, mengherankan apabila kejadian ini spontan. Namun, kalau ada yang mendangki, semestinya aparat tidak sulit mememukannya.

Untuk kejadian ini, kata Magnis, semestinya pemerintah menarik garis terhadap kekerasan apa pun. Pelaku atau orang yang mengajak melakukan kekerasan harus ditangkap.

Muliawan juga meminta pemerintah tak bermain-main dan serius menanggapi insiden kekerasan terhadap warga negara ini. Penegakan hukum yang tegas diperlukan. Itu karena kasus ini tak hanya melukai bangsa, tetapi juga mengganggu citra Indonesia di dunia usaha internasional.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mubaimin Iskandar menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dianiaya, apalagi dibunuh, kendati dianggap sesat. Kekerasan tersebut justru memperlakukan Islam.

Dalam pernyataan bersama di kantor PKB itu, hadir pula aktivis hak asasi manusia (HAM), Siti Musdah Mulia. Musdah menegaskan, jihad sesungguhnya adalah mempertahankan Indonesia sampai titik darah penghabisan, bukan menyakiti umat lain.

Pemerintah membiarkan

Secara terpisah, di Jakarta, jaringan tokoh muda lintas organisasi dan lintas agama Indonesia menilail pemerintah telah membiarkan terjadi kekerasan yang merenggut nyawa warga negara dan merusak tempat ibadah akhir-akhir ini. Hal itu merupakan kejobatan karena merenggut hak hidup dan kebebasan beragama di Indonesia.

Pernyataan tersebut dikeluarkan sebagai reaksi atas penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Pandeglang, Minggu, serta kerusuhan dan pembakaran gereja di Temanggung pada Selasa lalu. Menurut Yudi Latif, dalam kasus Ahmadiyah, gejala dan tanda kerusuhan sudah terdeteksi dan aparat sudah mengetahui itu beberapa hari sebelumnya. Sejumlah polisi juga datang ke lokasi kejadian. Namun, aparat tidak sungguh-sungguh mencegah, hanya melihat, bahkan sebagian malah membincar saat ada penyerbuhan.

Di Temanggung, gejala kerusuhan sudah tertium intelijen polisi. Hukuman lima tahun bagi terdakwa perista agama Antonius Bawengan merupakan hukuman maksimal yang semestinya tak memicu ledakan amarah massa. Apakah ada jarak waktu dan tempat antara gedung pengadilan dan gereja yang dibakar.

"Ada waktu untuk mencegah kekerasan dalam kasus Ahmadiyah dari Temanggung. Tetapi, aparat keamanan tidak mengantisipasi," katanya.

Adhie Nassardi mengatakan,

dua kekerasan itu tampak sebagai upaya pengalihan isu. Ketika pemerintah terkekan tokoh lintas agama dengan isu kebohongan dan kegagalan pemerintah serta adanya isu mafia hukum, tiba-tiba dua kasus tersebut meledak.

Menurut Haris Busby dari Partisi 38, pemerintah cenderung berwaena saja dalam mengatasi dua kasus itu ataupun kasus lain sebelumnya. Saat kasus meledak Presiden sibuk mengutuk atau mengecamnya. Padahal, Presiden semestinya bertindak nyata.

Direktur Eksekutif Demos Antonius Pradjasto dalam peringatan 100 hari wafatnya aktivis HAM, Asmara Nababan, mengingatkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus bertanggung jawab atas terus berlangsungnya kekerasan yang dilakukan kelompok ekstremis terhadap pihak yang tidak satu paham dengan mereka. Kekejian saat ini terjadi dengan adanya ambisi blok politik ekonomi dan blok fundamentalisme agama yang ingin menguasai Indonesia.

Anggota Komisi Nasional HAM, Stanley Adi Prasetyo, yang pernah menjadi teman kerja Asmara Nababan, menambahkan, kekerasan terus terjadi sejak tahun 2001 ketika proses reformasi dibajak elite politik baru, yang berkolaborasi dengan elite politik lama. "Terjadi kegagalan dalam proses demokratisasi dan reformasi di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, untuk mencegah konflik, Polresta Bandar Lampung melakukan dialog dan pendekatan kepada puluhan jemaah Ahmadiyah di wikayah tersebut. Kepala Polresta Bandar Lampung Komisaris Besar Gunter Gaffar, Rabu, mengungkapkan, ada sekitar 100 warga Ahmadiyah di kota itu.

(PRA/ANQ/ARA/PON/INA/
ONG/ZAL/ABK/IAM)

Pers Jangan Provokatif

Ketua PWI pada Hari Pers: Wartawan Sekarang Lebih Berat

KUPANG, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pers Indonesia menghindari pemberitaan yang bersifat provokatif, jauh dari penghasutan-penghasutan, sehingga tidak merusak kerukunan umat beragama.

Pesan itu disampaikan Presiden dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Ke-65 tahun 2011 yang dipusatkan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (9/2).

Hadir dalam acara itu Ny Ari Yudhoyono, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Panglima TNI Jenderal Agus Suhartono, Ketua Dewan Pers Bagir Manan, dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya. Hadir pula sejumlah tokoh pers senior dan pengusaha, seperti Atmakusumah Astraatmadja, Fikri Jufri, August Parengkwan, Turman Azam, Soban Siagian, Dahlan Iskan, dan Chairul Tanjung.

Pada bagian lain pidatonya, Presiden berpesan agar pers dalam liputannya sejuanis dengan tekad dan komitmen untuk memperkokoh toleransi dan menegakkan aksi-aksi yang merusak kerukunan beragama.

Presiden juga menyinggung persoalan aktual terkait dengan anak massa di Cikemisk, Banten, dan Tembungung, Jawa Tengah.

Lebih berat

Sebelumnya, ketika menyampaikan laporannya kepada Presiden, Ketua Panitia HPN sekaligus Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono menyatakan, tanggung jawab pers nasional saat ini justru semakin besar.

Pers nasional harus prihatin bahwa kondisi bangsa ini masih tertinggal dari sahabat-sahabat bangsa lain di sekitarnya. Oleh karena itu, pers nasional diharapkan ikut serta membangun dan mencairkan jalan keluar.

Mengutip pesan dari tokoh pers nasional Jakob Oetomo yang baru saja ditemuinya menjelang HPN, Margiono menjelaskan, wartawan pada era sekarang ini

sebenarnya sulit. Wartawan tidak bisa lagi melihat sebuah peristiwa sebatas peristiwa itu sendiri, tetapi harus mendelokkan dalam konteksnya.

Pada bagian lain Margiono menjelaskan, dalam HPN Ke-65 di Kupang, kalangan pers nasional telah melaksanakan konvensi media dengan fokus membarung NTT dan memajukan pers nasional.

Memrakatkan pembangunan NTT, melalui forum HPN, Selasa malam, ditandatangani nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi NTT dan Asosiasi Internasional Pengusaha Taiwan untuk investasi 90 juta dolar AS dalam bidang industri peternakan integratif di Pulau Sumba seluas 80.000 hektar dalam tiga tahun dari sekarang.

Sejumlah tokoh pers nasional juga memperoleh penghargaan dari PWI, misalnya Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetomo mendapat medali emas *Spirit Journalism*, Sabam Siagian (*The Jakarta Post*) memperoleh medali emas *Persaudaraan Pers*, dan Fikri Jufri (pemdiri majalah *Tempo*) mendapat penghargaan sebagai Tokoh Pers Bidang Kom-

petensi.

Sebelumnya, pada acara resepsi HPN, Selasa malam, Pemprov NTT dan panitia HPN menganugerahkan penghargaan berupa sertifikat dan cincin emas kepada 10 wartawan dan pekerja pers asal NTT yang dinilai berjasa bagi pendidikan masyarakat luas, khususnya masyarakat NTT, di media masing-masing.

Meneka, antara lain, Birkard Bugan (Pemred *Kompas*), alm Julius Syaramanul (*Suara Pembinaan, Suroyo*), Pastor Alex Bedding (mantan Pemred *Mingguan Dera*), alm Valens Dopy (*Kompas*), Frans Padak Demon (*Voice of America*), Lorenz Tuto (*Media Indonesia*), Primus Dorimulu (*Investor Daily*), dan Peter Rohi (*Suroyo*).

Selain itu, PWI juga memberikan penghargaan medali emas *Persaudaraan Pers* kepada Wakil Perdana Menteri Timor Leste Jose Luis Guterres dan Bahamuddin B Reseh dari National Union Journalist of Malaysia.

Pada kesempatan yang sama, panitia HPN juga menganugerahkan Hadiah Adininggoro bagi 10 wartawan.

(02/02/ANS/KOR/HRD)

ANARKI

Kapolda Metro Jaya: Perusuh Ditembak di Tempat

JAKARTA, KOMPAS — Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Sutarnan mengingatkan, polisi akan menembak di tempat para perusuh.

"Polisi akan melakukan Protap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penindakan Para Perusuh jika Jakarta berubah menjadi anarki seperti terjadi di Cikeseik, Pandeglang, Banten, dan Tembung, Jawa Tengah," kata Sutarnan, Rabu (9/2).

Ia percaya, jajarannya berani bertindak dan teguh dalam bekerja. "Kalau yang bertindak anarkis, jajaran saya akan menjalankan Protap Nomor 1 itu. Saya akan memikul tanggung jawab itu," tutur Sutarnan.

Meski demikian, ia berharap setiap pejuang kerusuhan dan anarki harus dihindari dengan

langkah preventif. Oleh karena itu, Polda Metro Jaya telah mengoptimalkan anggota Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Korpsad Kantibmas) dan Saka Bhayangkara.

"Jaringan ini diharapkan mampu menjadi penyambung lidah kekuatan intelijen polisi untuk menegak dan mengubah potensi kerusuhan dan anarki.

Sutarnan mengatakan, sampai kemarin ia belum mendapat informasi mengenai kemungkinan kerusuhan di Jakarta, terutama menyangkut kemungkinan bentrokan antara yang pro dan kontra Ahmadiyah.

"Sampai hari ini belum ada permintaan penugasan khusus oleh polisi yang dilayangkan perwamus Ahmadiyah, Laporan

tentang adanya teror terhadap mereka juga belum ada," tutur Sutarnan.

Ia mengingatkan, "Polisi tidak berurusan dengan soal akidah. Kalau sudah masuk wilayah pidana, apalagi bila hal itu menyangkut tindakan penusakan dan penganiayaan oleh massa, itu menjadi tanggung jawab polisi, dan kami tidak ragu menerapkan Protap Nomor 1," ujarnya.

Sidang Ba'asyir

Pada bagian lain, Sutarnan mengatakan pihaknya akan mengerahkan 3.000 personel untuk mengamankan sidang perdana Abubakar Ba'asyir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (10/2). "Ada 3.000 anggota gabungan dari Polda Metro dan Polres Metro Jaksel yang akan

disiapkan untuk mengamankan gedung PN Jaksel dan lokasi sekitarnya," ucapnya.

Ia sudah memesintahkan jajarannya menyisir kawasan itu agar bebas dari senjata tajam dan senjata api. "Kami memegang sidang, polisi akan memeriksa setiap pengunjung dan pelintas gedung PN Jaksel. Mereka yang didapatkan membawa senjata tajam atau senjata api akan kami periksa motifnya," ujarnya.

Kapolres Metro Jaksel Komisionaris Besar Gatot Eddy Pratomo menambahkan, jajarannya telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi kemungkinan kerusuhan. "Saya sudah minta anggota 'membersihkan' halaman gedung agar bebas dari parkir kendaraan bermotor," ujarnya.

(WIN)

Komnas Temukan Kejanggalan

Polisi Tetapkan Lima Tersangka Insiden Cikeusik

JAKARTA, KOMPAS – Kekerasan terhadap warga Ahmadiyah yang berujung dengan tewasnya tiga orang di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2), adalah kasus yang direkayasa untuk kepentingan tertentu. Banyak kejanggalan yang menunjukkan peristiwa itu sebenarnya bisa dicegah, tetapi seperti sengaja dibiarkan meletup.

Demikian temuan sementara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang disampaikan Wakil Ketua Komnas HAM M Ridha Saleh di Jakarta, Kamis. Hasil itu diperoleh setelah sejumlah anggota Komnas HAM melihat fakta di lapangan pascakerusuhan, Selisa dan Babu.

"Kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah itu peristiwa luar biasa yang memiliki banyak dimensi. Dugaan kuat kami, ada rekayasa," kata Ridha Saleh.

Dugaan itu muncul setelah

Komnas HAM mencermati adanya sejumlah kejanggalan di lapangan dan berbicara dengan beberapa saksi. Lokasi kejadian di Kampung Peundeuy, Desa Umhulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, merupakan wilayah yang selogian penduduknya mesan dan jah dari kota. Kelompok Ahmadiyah di sana kecil dan baru muncul sejak Februari 2010.

Aparat keamanan mengetahui gejala kekerasan dua hari sebelum peristiwa meletus. Apalagi ada pesan pendek yang memberi

informasi kemungkinan itu. Banyaknya orang dari daerah lain bertalangan ke sana juga terdeteksi. Namun, aparat keamanan tak segera mengerahkan pasukan yang memadai dan mencegah kekerasan terjadi.

Untuk menelusuri lebih jauh apa yang sesungguhnya terjadi di balik berbagai kejanggalan itu, Komnas HAM resmi membentuk tim investigasi gabungan atas kasus Cikeusik, Pandeglang. Selain turun ke lapangan, Komnas HAM juga mencari keterangan dari saksi, kepala desa, aparat, dan pejabat pemerintah.

"Kami mendesak pemerintah segera menangkap pelaku kekerasan, menegakkan hukum, dan membongkar semua ini," ujar

(Bersambung ke hal 15 kol 1-2)

BACA JUGA HAL 4

Polisi Belum Temukan...

Temuan Sementara **Komnas HAM**

Kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, diduga direkayasa untuk kepentingan tertentu.

Sejumlah Kejanggalan

● Lokasi kejadian di Kampung

Peundeuy. Wilayah itu sebagian penduduknya rukun mesian dan jah dari kota. Kelompok Ahmadiyah di kampung itu kecil dan baru muncul sejak Februari 2010.

● Aparat sudah mengetahui gejala kekerasan dua hari sebelum peristiwa. Ada pesan pendek yang memberi informasi kemungkinan peristiwa itu.

● Banyaknya orang dari daerah lain yang berda tangan ke Cikeusik sudah terdeteksi. Namun, aparat keamanan tidak segera mengerahkan pasukan yang memadai.

Jumlah Korban

● 3 meninggal
● 17 korban kekerasan
(13 terdapat, 4 belum diketahui)

Sumber: Kompas.com

DATA KOMNAS CITRANUS AND HASPIRATI/AN-GADIPK 11

Komnas Temukan

(Sambungan dari halaman 1)

Ridha Saleh.

Sesuai dengan catatan Komnas HAM, selain tiga warga meninggal, ada 17 korban kekerasan di Cikeusik. Sebanyak 13 orang di antaranya terdata, seperti dirawat di rumah sakit atau kembali ke rumah. Empat orang lagi belum diketahui keberadaannya.

Kamis siang, Komnas HAM juga menerima pengaduan dari kelompok Petisi 28 yang diwakili beberapa aktivisnya, antara lain Gigih Guntoro, Hartsa Mashirul, dan John Mempi. Mereka mendesak Komnas HAM meminta keterangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Pejabat itu bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik dan pembakaran gereja di Temanggung, Jawa Tengah.

Menurut Ridha Saleh, Komnas HAM berencana meminta penjelasan dari Menko Polhukam, Kepala Polri, Kepala Polda Banten, dan kepala polsek. Namun, untuk meminta penjelasan dari Presiden, perlu dibicarakan lagi.

Menurut Gigih, Petisi 28 juga memiliki data ada skenario untuk meletupkan kerusuhan. Ada mobilisasi warga dari luar Cikeusik dan Temanggung. Setelah peristiwa itu usai, sebagian massa memperoleh imbalan dari seseorang. "Mungkin saja kekerasan ini sengaja dirancang untuk mengalihkan isu," katanya.

Lima tersangka

Dari Pandeglang, Kamis, dilaporkan, polisi menetapkan lima tersangka dalam kasus kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik. Tersangka berinisial YA alias I, UJ, KE, KN, dan KMH.

"Jumlah tersangka mungkin bertambah. Ada daftar pencarian orang (DPO atau buron) lima orang," kata Kepala Polda Banten Brigadir Jenderal (Pol) Agus Kusnadi di Pandeglang, semalam. Polisi juga masih memeriksa saksi.

Agus mengatakan, polisi berupaya mengungkap kejadian di Cikeusik hingga tuntas. Semua pelaku yang terlibat kekerasan itu akan diproses secara hukum.

Menurut Agus, sebelum peristiwa di Cikeusik terjadi, telah diketahui rencana kegiatan masa yang akan mengusir dan membubarkan kegiatan Ahmadiyah. Rencana itu disebarkan melalui pesan pendek pada 3 Februari. Pada 4 Februari dilakukan koordinasi, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, untuk menanggulangi isu itu. Pada 5 Februari, polisi mengevakuasi tokoh Ahmadiyah di Cikeusik, Suparman, dan dua anggota keluarganya serta membawa mereka ke Polres Pandeglang.

Minggu lalu pukul 03.00, Polri menjaga rumah Suparman yang kosong. Sekitar pukul 07.00, ada dua mobil yang mengangkut beberapa orang dari luar Pandeglang ke rumah Suparman.

"Petugas menegosiasikan untuk mengevakuasi mereka, tetapi mereka menolak dengan alasan akan mempertahankan barang inventaris milik Ahmadiyah," kata Agus. Menurut dia, jumlah personel di Cikeusik sebelum kejadian itu 30 orang, selanjutnya ditambah 115 personel.

Menurut dia, sekitar 1.500

orang yang mendatangi rumah Suparman berasal dari beberapa kecamatan, seperti Cigeulis, Cibaliung, dan Cikeusik. Polisi awalnya hanya mengamankan rumah Suparman.

Kamis sore, ratusan ulama, tokoh masyarakat, dan santri mendatangi Polres Pandeglang. Mereka, antara lain, mendesak agar polisi membebaskan beberapa ulama yang masih berada di kantor polisi terkait dengan kasus Ahmadiyah di Cikeusik.

Menurut Agus Setiawan dari Tim Pembela Muslim (TPM) Banten, mereka berupaya agar ulama yang statusnya terperiksa tidak ditahan.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif di Jakarta, Kamis, meminta pemerintah konsentrasi bekerja untuk penyelesaian pelbagai permasalahan yang selama ini merongrong rasa keadilan rakyat.

Dialog terbuka

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kamis di Jakarta, menjelaskan, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Ahmadiyah masih akan dikaji. Tuntutan pencabutan SKB atau usulan dijadikan peraturan yang mengikat belum ditanggapi.

"Kita akan mengundang berbagai pihak dari perguruan tinggi, ulama, dan pemerhati masalah ini untuk membahas solusi yang paling pas," kata Gamawan.

Sementara belum ada putusan mengenai ini, SKB 3 Menteri—Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung—tetap berlaku. SKB tetap dianggap pedoman untuk menghadapi persoalan terkait Ahmadiyah.

Kendati demikian, Gamawan menegaskan, tidak ada toleransi kepada siapa pun yang melanggar hukum, termasuk melakukan kekerasan terhadap orang lain.

Menteri Agama Suryadharma Ali, secara terpisah, Kamis di Jakarta, menyatakan, pemerintah sedang menyiapkan dialog terbuka bersama jemaah Ahmadiyah dengan melibatkan ahli dan organisasi keagamaan di Indonesia. Lewat dialog itu diharapkan permasalahan terkait dengan kelompok ini bisa makin jelas dan kemudian diambil kesimpulan yang tepat.

Menurut Suryadharma, dialog itu akan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, beberapa organisasi Islam lain, ahli tentang Ahmadiyah, lembaga swadaya masyarakat pemerhati Ahmadiyah, dan perwakilan pemerintah. "Konsepnya sedang disusun. Dialognya mungkin minggu depan," katanya.

Dalam dialog itu, katanya, Ahmadiyah akan diberi kesempatan untuk menjelaskan pahamnya. Demikian pula kelompok yang memandang Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang dari Islam. Dengan begitu, akan terkumpul informasi yang utuh dan seimbang mengenai masalah ini.

"Setelah itu, kita akan mudah mencari solusi yang terbaik. Bagaimanapun, jemaah Ahmadiyah itu warga negara Indonesia," katanya. Menurut Suryadharma, ada wacana empat alternatif untuk menyelesaikan kasus Ahmadiyah.

(IAM/EDN/HAR/WHY/CAS/
NTA/APO/INA/ATO/ENG)

KERUSUHAN TEMANGGUNG

Polisi Belum Temukan Ormas Perusuh

TEMANGGUNG, KOMPAS — Kepolisian Daerah Jawa Tengah belum menemukan adanya keterlibatan organisasi kemasyarakatan atau kelompok tertentu dalam kerusuhan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (8/2).

Kemala Poldo Jawa Tengah Inspektur Jenderal Edward Aritenang mengatakan, pihaknya sementara ini juga tidak mengagendakan untuk meminta keterangan dari ormas-ormas atau kelompok-kelompok tertentu.

"Apa hubungannya ormas dalam kasus ini? Yang kami periksa sebagai saksi adalah mereka yang melihat, mendengar aksi kerusuhan yang terjadi di Temanggung, Selasa lalu," ujar Edward, saat ditemui di Markas Kepolisian Resor Temanggung, Kamis (10/2).

Edward mengatakan, demi kemajuan penyelidikan, pihaknya membuka diri untuk menerima informasi dari masyarakat. Jumlah tersangka kasus kerusuhan masih delapan orang. Jumlah saksi yang diperiksa mencapai lebih dari 10 orang dan akan terus bertambah seiring dengan perkembangan penyelidikan.

Sementara itu, Sekretaris Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Kabupaten Temanggung Achmad Trias Widada mengatakan, saat terjadi aksi kerusuhan, sebagian anggota GPK Temanggung memang sengaja datang ke gedung



Apa hubungannya ormas dalam kasus ini? Yang kami periksa sebagai saksi adalah mereka yang melihat, mendengar aksi kerusuhan yang terjadi di Temanggung.

Edward Aritenang

PN Temanggung, dengan tujuan untuk mengendalikan massa. Namun, dia pun tidak bisa menjamin semua anggota GPK tidak terlibat dalam kerusuhan. "Bisa saja ada yang terprovokasi dan tersulut emosinya karena ulah oknum-oknum tertentu. Itu semua terjadi di luar sepengetahuan kami," ujarnya.

Wakil Kepala Polres Temanggung Komisaris Roy AC mengatakan, kegagalan pengamanan salah satunya karena tidak ada anggaran yang cukup. "Seandainya memiliki dana untuk membuat 100 barikade, kami akan dapat menyebabkan lebih banyak personel ke berbagai tempat ibadah dan tidak terfokus di gedung pengadilan saja," ujarnya.

Di Jakarta, Wakil Ketua DPR Pramono Anung berharap pe-

rintah Presiden Yudhoyono tentang pembubaran ormas perusuh dapat dilaksanakan aparat di lapangan. Jika perintah itu tidak dilaksanakan, wibawa dan kredibilitas Presiden akan turun.

Menteri Agama Suryadharma Ali menyambut baik gagasan Presiden Yudhoyono tentang pembubaran organisasi yang membuat kerusuhan. Tindakan hukum itu bisa berupa pembekalan sampai pembubaran. "Kementerian Agama tak punya kewenangan untuk mengidentifikasi organisasi yang mengorganisasi kekerasan. Biar kepolisian yang menanganinya," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, meminta pembubaran ormas perusuh dilakukan sesuai dengan proses hukum. "Jadi, pembubaran itu bukan oleh keputusan politik atau penguasa, tetapi akibat dari proses dan putusan hukum," ujar Lukman Hakim.

Pada Jumat pagi ini sekitar 150 aktivis Jaringan Persaudaraan Yogyakarta berencana berkunjung ke tiga gereja di Temanggung yang dirusak pada Selasa lalu. Tokoh agama sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Umahat, KBI Abdul Muhalim, mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bentuk solidaritas sekaligus penyembuhan trauma masyarakat terhadap kasus kekerasan.

©ESI/ABK/LAM/NWO/EKI/JON

KERUSUHAN TEMANGGUNG

Tersangka Menjadi 14 Orang

TEMANGGUNG, KOMPAS — Jumlah tersangka kasus kerusuhan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada Jumat (11/2) bertambah enam orang. Dengan demikian, jumlah tersangka kasus pembakaran serta perusakan tiga gereja dan kerilaman di Temanggung, Selasa lalu, menjadi 14 orang.

Tambahan enam tersangka tersebut merupakan warga Desa Sigedang, Kecamatan Trotop, Semana tersangka diduga sebagai pelaku kerusuhan di lapangan.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Irjen Edwanl Anthonang mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan apakah kerusuhan tersebut merupakan aksi spontan atau terorganisasi.

Mulai hari Sabtu (12/2), kasus kerusuhan itu akan langsung ditangani di Kantor Polisi Jawa Tengah di Semarang sehingga semua bukti dan tersangka akan

diamankan di Semarang.

Kemarin Kepolisian Resor Temanggung telah memeriksa 24 warga Desa Sigedang, Kecamatan Trotop, 56 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Temanggung.

Menurut Kepala Desa Sigedang, Jariyah, ke-24 orang tersebut dijemput polisi dari rumahnya masing-masing pada Jumat sekitar pukul 04.30 WIB. Dari 24 orang tersebut, seorang di antaranya merupakan anak di bawah umur berusia 15 tahun dan tertua 23 tahun. Menjelang kerusuhan terjadi, mereka diajak Shihabudin, ulama yang biasa mengadakan kegiatan pengajian di Desa Sigedang, untuk menonton sidang penistaan agama di Pengadilan Negeri Temanggung. Mereka berangkat dengan kendaraan sewaan.

Pada Jumat (11/2) Kepala Polres Temanggung Ajun Komisaris

Besar Anthony Agastinus K diganti dengan Kukuh Kalis, mantan Kepala Polres Rembang. Serah terima jabatan kemarin berlangsung pada malam hari, tertutup bagi liputan wartawan.

Sementara itu, pertemuan forum silaturahmi antarumat beragama yang rencananya digelar di Pendopo Kabupaten Temanggung, Jumat, tidak jadi. Polisi menyatakan situasi keamanan tidak kondusif dan menyarankan pertemuan digelar di Semarang.

Dua bus yang membawa rombongan, termasuk petol akbar Abu Abdurrahman Wahid, Aliq Qotrunnada Wahid, akhirnya mampir di Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam di Tegallreja, Magelang, Jawa Tengah, yang dipimpin HM Yusuf Chodori. Rombongan akhirnya menggelar dialog di pondok pesantren tersebut.

(SON/EGH/MKN/BAY/EKD)

k
r

P
P
P
k
k
T
ji
A
s
F
t

d
g
E
h

=
F
J

J
p
d
n
a
n

Pengarah Ditangkap

MUI: Insiden Cikeusik Bukan Penyerangan

TEMANGGUNG, KOMPAS — Aparat Kepolisian Daerah Jawa Tengah membekuk orang yang diduga aktor intelektual dalam kerusuhan di

Temanggung, Jawa Tengah. Orang yang berinisial SYB itu, Sabtu (12/2), ditangkap di rumahnya di Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung.

SYB diduga mengorganisasi kerusuhan dengan mengumpulkan dan memberi makan massa. Dia juga mengarahkan massa tentang tindakan yang harus dilakukan jika majelis hakim tak menyetujui hukuman mati bagi terdakwa perkara penistaan agama yang diskand di Pengadilan Negeri Temanggung, Senin lalu.

Kepala Pokda Jateng Inspektur Jenderal Edward Aritonang, di Temanggung mengatakan, polisi masih mengembangkan penyelidikan, termasuk mencari tahu sumber pendanaan untuk menggerakkan massa itu.

Polda Jateng, terkait kerusuhan di Temanggung, pekan lalu, telah memeriksa 32 saksi, dan 24 orang di antaranya, termasuk SYB, ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka warga Sigedang, Kecamatan Trepur, dan Kecamatan Wonoboyo, Temanggung.

Kepala Desa Sigedang Jariyah menyebut nama Syhabuddin (bukan Shihabudin) sebagai orang yang mengajuk sejumlah warga Sigedang, sekitar 56 kilometer dari pusat kota Temanggung, untuk menontoni sidang kasus dugaan penistaan agama. Mereka berangkat dengan mobil sewaan. Hasil pemeriksaan sementara, sehari sebelum kerusuhan atau

pada 7 Februari, SYB mengumpulkan dan mengarahkan massa. Beberapa jam sebelum sidang kasus dugaan penistaan agama dimulai di PN Temanggung, 8 Februari 2010, SYB mengarahkan massa kembali.

Untuk sementara, motif perbuatan SYB adalah tak puas terhadap putusan majelis hakim PN Temanggung, yang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara bagi terdakwa Antonius Richmond Bawengun. "SYB dan 23 tersangka lain tidak mengetahui hukuman, dan tidak memahaminya, vonis yang dijatuhkan hakim sudah hukuman maksimal," kata Edward.

Selain dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wonosobo, penasihat hukum 24 tersangka, mengatakan, tersangka tak memiliki pengetahuan hukuman.

Bukan penyerangan

Sementara itu, terkait kekeharasan pada jemaah Ahmadiyah di Cikensik, Kabupaten Pandeglang (Banten), Sabtu, Sekretaris Komisi Pengkajian/Wakil Sekretaris Tim Pencari Fakta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis memutarakan, berdasarkan temuan tim investigasi MUI, bentrokan itu dipicu orang luar. Selain itu, dalam bentrokan di Cikensik



Motif perbuatan SYB adalah tak puas terhadap putusan majelis hakim PN Temanggung.

itu juga ada indikasi pelanggaran terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait Ahmadiyah dan ada indikasi kekuatan asing di dalamnya.

Cholil mengki, pemacu orang luar itu terlihat dari berdatangnya 17 orang memakai dua mobil dan satu sepeda motor dari luar Cikensik, Pandeglang, pada Minggu, 6 Februari pagi. "Yang terjadi juga bukan penyerangan, tetapi bentrok. Bentrok itu dipicu perkataan dari mereka (Ahmadiyah) yang akan mempersembahkan rumah sampai titik darah penghabisan," katanya.

Indikasi pelanggaran SKB, kata Cholil, karena pada tanggal 18 November 2010, Suparman, tokoh Ahmadiyah di Cikensik, telah membuat pernyataan bernomor untuk mematuhi SKB. "Kegerakan masyarakat, ternyata rumah Suparman dijadikan tempat ibadah. Ada tarawih. Diindikasikan juga ada yang diajak," katanya.

Berkaitan dengan indikasi kekuatan asing, Cholil mengatakan, saat diperiksa polisi pada malam bentrokan, Suparman tak diperik-

sa terkait Ahmadiyah. "Ya sebagai saksi terhadap warga negara asing di rumahnya," katanya.

Sebelumnya, di Jakarta, Kamis dan Jumat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan, penyerangan pada jemaah Ahmadiyah di Cikensik berlatar belakang terorganisasi baik. Ini dibuktikan dengan adanya peta penjaran pada pelaku penyerangan dan adanya sejumlah kebanggaan (*Googles*, 11-12/2).

Terkait dengan insiden di Cikensik itu, Sabtu, jabatan Kepala Polres Pandeglang diserahkannya dari Ajun Komisaris Besar Alex Puzi Basad kepada Ajun Komisaris Besar Aely Suseno. Serah terima jabatan itu dipimpin Kepala Pokda Banten Brigadir Jenderal (Pol) Agus Kusnadi, Agus, Senin besok, juga akan menyerahkannya jabatan.

"Apa pun yang saat ini dialami saya ataupun mantan Kepala Polres Pandeglang merupakan risiko jabatan," kata Agus.

Agus memastikan pergantian Kepala Pokda Banten dan Kepala Polres Pandeglang tidak mengganggu penyelidikan yang berlangsung terkait insiden Cikensik. Namun, sampai Sabtu belum ada laporan penambahan tersangka. Jumlah tersangka dalam kasus itu tetap lima orang dengan dua orang di antaranya ditahan.

Sosiolog Thamrin Anas Tamagola menilai, pencopotan Kepala Pokda Banten dan Kepala Polres Pandeglang terkait insiden Cikensik tidak cukup. Tindakan itu harus disertai dengan pemberantasan Polri secara sistemik.

(BGI/SOX/CAS/ANA)

Kebinekaan Pun Terancam

Pemerintah Diminta Tegas Tangani Kekerasan

JAKARTA, KOMPAS — Kekerasan atas nama agama atau apa pun merupakan ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Di tengah kondisi politik dan ekonomi yang belum menentu, kesadaran tentang kebinekaan seharusnya menjadi benteng terakhir keindonesiaan.

"Penegakan hukum yang tegas menjadi kunci utama agar kasus-kasus itu (kekerasan) tidak mengganggu keberagaman, yang merupakan fakta obyektif bangsa Indonesia," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (13/2).

Pada saat yang sama, lanjut Lukman Hakim, penyebab kekerasan seperti yang terjadi di Cikensik, Pandeglang, Banten, dan Tembunggar, Jawa Tengah, juga harus segera diungkap dan diatasi agar hal serupa tidak terulang.

Yudi Latif dari Reform Institute menuturkan, kebinekaan Indonesia disokong oleh dua hal. Pertama, sikap masyarakat untuk bisa menerima perbedaan sebagai fakta dan harus dihormati. Kedua, keberadaan negara yang dapat mempersatukan. Untuk itu, negara harus dapat melindungi semua warganya, antara lain dengan menjaga keragaman yang ada di dalamnya.

"Namun, sering kali negara

bukan saja gagal melindungi keragaman, melainkan justru memanfaatkan atau membiarkan kekerasan yang diakibatkan oleh keragaman itu untuk kepentingan jangka pendek," tutur Yudi.

Kasus Cikensik dan Tembunggar, ujar Yudi, merupakan pertautan antara adanya kelompok masyarakat yang sulit menerima perbedaan dengan sejumlah alasan dan pembatasan negara terhadap kekerasan yang dilakukan kelompok masyarakat itu. "Saya tidak tahu siapa yang memantik, tetapi diduga ada yang dimainkan karena pola kedua kasus itu relatif sama," ucap Yudi.

Ridha Saleh dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membenarkan adanya persamaan pola dalam kerusuhan di Cikensik dan Tembunggar. "Ada keseruan kuat aparat keamanan tidak maksimal mengatasi dua kasus itu, padahal sejak beberapa hari sebelumnya sudah ada gejolannya," tutur Ridha.

Untuk memecahkan hal itu, Ridha berharap semua pimpinan aparat keamanan yang terkait

dengan dua peristiwa tersebut segera diperiksa. "Mereka tidak cukup hanya dimutasi seperti yang telah dilakukan terhadap sejumlah pimpinan Polri di Tembunggar dan Banten. Mereka juga harus mempertanggungjawabkan kelalaian yang telah dilakukan," kata Ridha.

Agar kasus tersebut tak terulang, pemerintah harus menindak tegas para pelaku kekerasan. Pemerintah juga diminta menegaskan tidak akan membiarkan jika peristiwa kekerasan seperti itu terjadi kembali.

"Pemerintah juga harus membuktikan itu semua dalam tindakan. Pemerintah harus menjelaskan akan memberi zero toleransi terhadap kekerasan, tapi sampai sekarang pemerintah tidak tegas," kata pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Deyarkara, Franz Magnis-Suseno, di Jakarta.

Ia menambahkan, di dalam negara yang beradab, berwibawa, dan berkarakter, tindak kekerasan seharusnya tak diizinkan. Tugas pemerintah adalah melindungi masyarakat agar bisa menerima perbedaan dan keberagaman.

"Sekama seseorang dan keluarganya tidak mengganggu orang lain, maka tetangga tidak boleh

(Bersambung ke hal 15 kol 4-7)

BAHA JUSA HAL 4

Kecam Aksi Kekerasan

Kebinekaan Pun Terancam

(Sambungan dari halaman 1)

menyampaikan urusan orang lain. Kita harus belajar menghormati ketuhanan orang lain. Ini tugas pemerintah untuk mendidik masyarakat," katanya.

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto, Jumat, juga menyampaikan agar pemerintah bersikap tegas. Lambangnya sikap pemerintah dalam mengambil keputusan bisa dianggap turut membina terjadinya kemungkinan konflik horizontal.

"Kami minta pemerintah untuk bersikap tegas. Bertindak dan kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeseh. Pendeglar, sesungguhnya tak perlu terjadi andai pemerintah tegas menyangkut kekerasan jemaah Ahmadiyah," kata Muhammad Ismail dalam jumpa pers yang juga dihadiri wakil dari beberapa organisasi Islam, seperti Al Was-

liyah, Syaikat Islam, Hidayatul-lah, dan Al Ittihadiyah. Ia menyalahkan terjadinya kekerasan itu. Jika hal itu direkayasa, maka perkerasannya harus ditangkap.

Jika benar kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah merupakan rekayasa, hal itu merupakan kejahatan keji karena mengakibatkan meninggalnya warga serta merusak hubungan umat beragama. Karena itu, aparat kepolisian didesak untuk tidak saja menindak para pelaku, tetapi juga menangkis mereka yang berada di balik kekerasan itu.

Demikian disampaikan Sekretaris International Conference of Islamic Scholars (ICIP) KH Hasyim Muzadi dan Wakil Ketua Umum Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) Piet Husbullah Chaudhri setelah seminar "Revitalization of Islamic Challenges and Opportunities" di Jakarta, Sabtu. Keduanya meminta polisi untuk bertindak ce-

pat menemukan dan menangkap para perkerayasa, mengungkap motifnya serta membongkar kasus itu secara tuntas.

"Siapa pun yang merekayasa dan berada di balik kekerasan di Cikeseh harus ditangkap dulu. Mereka menjadikan rakyat kecil sebagai korban. Apalagi, pola semacam ini sudah berkali-kali terjadi di beberapa daerah," kata Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum PR Nahdlatul Ulama.

Piet Husbullah Chaudhri menikahi, kalau kekerasan di Cikeseh hasil rekayasa, tentu itu membahayakan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Rasa aman dan keselamatan hidup warga melemah. Lebih dari itu, kerukunan umat beragama yang selama ini sudah terganggu kini kian memburuk. Citra Indonesia di dunia internasional juga memburuk.

"Jika aktor perkerayasa tidak dapat ditangkap dan ditindak

tegas, kekerasan itu akan menjadi preseden bagi kasus-kasus konflik umat beragama di daerah lain," katanya. Kemungkinan itu bisa terjadi karena kebencinan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini memang sedang tertekuk akibat berbagai persoalan, seperti kemiskinan, pengangguran, penegakan hukum yang lemah, kasus korupsi, mafia hukum yang bisa membuat orang kecewa. "Semua itu bisa membuat orang mudah terprovokasi untuk melakukan kekerasan," katanya.

Sementara itu, lima tersangka kasus kerusuhan Cikeseh telah memujuk Tim Pembela Muslim (TPM) sebagai kuasa hukum. Dua di antara mereka sudah ditahan, sedangkan tiga lainnya belum ditahan. Menurut Ketua Dewan Pembina TPM Mahendradatta di Jakarta, Niryo, yang terjadi di Cikeseh bukan penyerangan, melainkan bertentangan.

(NSW/LOK/AM/FA/INA)



PASCA-KERUSUHAN

Berharap Peristiwa Tragis Itu Tak Terulang Lagi

Sampai sekarang saya tak bisa melupakan kejadian itu. Masih terbayang-bayang dalam pikiran saya. Apalagi kalau ingat saat Romo Sadana (salah seorang pastor) dikelilingi massa yang beringsis dan dipukul. Saya benar-benar ngeri melihatnya," ujar Priyo Purwoko, koster di Gereja Katolik St Petrus dan Paulus Temanggung, Jawa Tengah, Jumat (11/2).

Menurut Priyo, perusakan gereja dan penakutannya salah satu bangunan di kompleks gereja oleh ratusan orang Selasa (8/2), benar-benar meninggalkan trauma mendalam bagi dirinya. Berharap penguas dan umat yang menyaksikan langsung amuk massa itu juga masih trauma.

Pada trauma itu pula yang membuat Priyo tak bisa menahan tangisnya setiap kali masuk dan membersihkan gereja. Kesaditan demikian, ia mengakui, tak ada sedikit pun dendam terhadap pelaku. "Kalau ingat kejadian itu, saya masih trauma," paparnya.

Ini membuat, sehari setelah amuk massa, misa pagi dibatalkan karena gereja masih dibersihkan. Misa baru dimulai lagi Kamis pagi. Pada misa pertama setelah kerusuhan, Romo Dwi Nugraha Sulistyio MSF, Romo Paroki St Petrus dan Paulus Temanggung, memberkati lagi ruangan gereja.

Pagi itu, misa harian sekitar pukul 05.30 di gereja yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Temanggung. Itu terasa berbeda. Sekitar 150 umat yang mengikuti misa pertama pasca-kerusuhan diliputi keharuan, tak kuasa menahan air mata saat menyaksikan bekas-bekas kerusuhan.

Betapa tidak, pagi itu, seram kaca di jendela dan pintu samping kiri dan kanan gereja telah berganti dengan tripleks. Beberapa bagian plafon gereja lepas, meninggalkan lubang-lubang.

Romo Sulistyio juga mengakui, kerusuhan yang terjadi Selasa lalu memang menimbulkan kesedihan mendalam di hati umat. Namun, dia mengajak umat untuk tidak mengenaung atau memikirkan kesedihan itu, apalagi menyikapinya sebagai dendam.

"Kami mengutuk perbuatan perusakan itu, tapi tidak perlu membenci pelakunya. Pelakunya adalah manusia sehingga jika kemarin dia berbuat jahat, di masa depan dia masih bisa berubah menjadi orang yang lebih baik," ujarnya.

Salah seorang umat, Yeri, warga Kampung Termination, Kecamatan Temanggung, menyatakan sedih atas peristiwa tersebut. Bahkan salah satu putrinya menangis saat melihat gereja rusak. Namun, dia meminta putrinya agar berusaha melupakan peristiwa kerusuhan tersebut.

Memaafkan

Gereja Katolik St Petrus dan Paulus adalah salah satu dari tiga gereja yang dirusak massa dalam aksi kerusuhan. Selasa lalu. Selain gereja tersebut, massa juga mengarak, merusak, dan membakar mobil di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPII).

Massa juga mendatangi Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Temanggung, membakar empat sepeda motor, merusak kantin TK dan kelompok bermain di Sekolah Kristen Shekinah, serta merusak Graha Shekinah. Sejuah ini pihak gereja belum menyatakan berapa kerugian gereja atas kerusuhan yang dialami.

Bagi umat di GPII Temanggung, amuk massa yang sampai membakar tiga mobil di halaman gereja tersebut benar-benar tidak diduga. Kendati masih waswas, pasca-kerusuhan, je mata gereja yang dipimpin Pendeta Frans Asa itu menyatakan berusaha memaafkan dan melupakan peristiwa tersebut.



Kami mengutuk perbuatan perusakan itu, tapi tidak perlu membenci pelakunya.

Dwi Nugraha Sulistyio

"Dengan peristiwa ini, mari kita lebih arif. Kalau alam, tumbuhan-tumbuhan, hewan, dan segala ciptaan Tuhan dipercayai kepada manusia untuk menjaganya, apalagi dengan sesama manusia," ujar Frans.

Memaafkan dan melupakan kerusuhan yang terjadi juga menjadi tekat jemaat GBI Temanggung. Oleh karena itu, sehari setelah amuk massa, meski kompleks gereja masih dijaga aparat keamanan, persekutuan doa tetap digelar pihak gereja.

Namun, untuk aktivitas sekolah, pihak sekolah masih meliburkan siswa hingga Sabtu. Hari ini rencananya sekolah dimulai lagi.

"Kami sama sekali tidak ada dendam. Kejadian ini justru membuat kami makin mendekatkan diri kepada Tuhan," kata Aric Sityo Wibowo, staf GBI Temanggung.

Kerusuhan di Temanggung juga mengganggu perasaan masyarakat Temanggung yang selama ini dikenal sebagai daerah tenang. Masyarakat pun berharap amuk massa seperti itu tidak terulang lagi pada masa-masa mendatang.

SONYA HELLEN SINOMPOR/
REGI NA BRUKMOFINI

Presiden Ajak Hidup Rukun

Indeks Indonesia sebagai Negara Gagal Akan Naik

JAKARTA, KOMPAS – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak bangsa Indonesia untuk bersikap tegar, hidup rukun, dan bersatu dalam menghadapi tantangan dan cobaan. Seruan ini disampaikan Presiden di depan puluhan ribu peserta Dzikir Akbar dan Doa untuk Bangsa di pelataran Monumen Nasional, Jakarta, Selasa (15/2).

"Jangan ribut dan saling menyalahkan saat menghadapi tantangan dan cobaan. Sebaliknya, kita harus bekerja lebih keras," ujar Presiden dalam acara yang

digelar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW itu. Kegiatan itu diprakarsai Majelis Rasufotab SAW yang dipimpin Habib Muazir al-Musawa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuturkan, kerukunan adalah sesuatu yang tak asing dalam tradisi Islam. "Semakin seseorang cinta kepada Rasul, semakin ia cinta pada kedamaian. Kerukunan ada sejak zaman Rasul," ujarnya. Kegiatan itu juga dihadiri Wakil Presiden Boediono, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timor Pradopo, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Selama 10 hari terakhir, kerukunan hidup bergayanya di Indo-

nesia mengalami ujian. Kekerasan terjadi di Cikemisk, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang mengakibatkan tiga warga Ahmadiyah tewas serta perusakan gereja di Kabupaten Tembungong, Jawa Tengah.

Presiden mengingatkan, masih banyak persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. "Banyak tujuan yang tercapai, tetapi banyak pula pekerjaan rumah serta masalah yang harus ditaksi supaya masa depan yang lebih baik dapat tercapai," tuturnya.

Berkaitan dengan Maulid Nabi

Muhammad SAW, Presiden pun memaparkan, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dengan melakukan perubahan secara bertahap. "Jadi, hendaknya

(Bersembang ke hal 15 kol 4-7)

BACA JUGA HAL 5

Belajariah di Kabi Merapi



Lihat Juga Video "Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW" di vd.tKompas.com/ci-Nimaulid

Presiden Ajak Hidup Rukun

(Sambungan dari halaman 1)

semua permasalahan diselesaikan secara bermartabat. Itu contoh bagi umat Islam di Indonesia," kata Presiden.

Indeks negara gagal

Di Jakarta, Selasa, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Yoseph Adi Prasetyo, mengungkapkan, peringkat Indonesia dalam indeks negara gagal yang dikeluarkan Foreign Policy pada 2011 diperkirakan naik dari urutan ke-62, yang dicapai pada 2010. Berulang kekerasan akhir-akhir ini akan menambah nilai kegagalan pemerintahan dalam menegakkan hukum dan melindungi warganya.

Perusakan dan perusakan tiga gereja di Tembung serta penyerangan jemaah Ahmadiyah di Panggulang termasuk dua kekerasan yang menonjol. Sebelumnya, banyak kasus kegagalan pemerintah dalam mengontrol negara seperti pembunuhan dan penyalakan di Pucak Jaya, penyalakan buruh migran, infrastruktur jalan rusak, dan perpecahan elite politik.

"Peringkat kegagalan kita akan naik lagi. Artinya, semakin masuk

kategori 60 negara gagal di dunia. Ini merugikan karena bisa mengancam kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia yang berimbas terhadap keberangannya investasi," katanya.

Mengutip data Failed States Index yang dikeluarkan Foreign Policy, Yoseph menjelaskan, posisi Indonesia saat ini masuk kategori *in danger* atau dalam bahaya. Artinya, jika berbagai masalah tidak tertangani, negeri ini akan masuk dalam hitungan 60 negara gagal. Penilaian didasarkan pada 12 parameter, antara lain tekanan penduduk, penurunan ekonomi, delegitimasi terhadap negara, pelayanan publik, hak asasi manusia, keamanan, dan perpecahan elite.

Pada 2007, Indonesia berada pada urutan ke-53. Peringkat itu menurun menjadi ke-60 pada 2008 dan urutan ke-62 pada 2010. Sebagai pembandingan urutan ke-60, ke-59, dan ke-58 saat ini diduduki Bosnia Herzegovina, Angola, dan Moldova.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh P Daulay meminta pemerintah berkesentrasi meningkatkan hukum dengan adil. Kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah dan

perusakan gereja harus dikikis.

Kerukunan hidup

Di Jakarta, Senin, Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH Hasyim Muzadi, saat bertemu tokoh agama, mengingatkan, keseimbangan antara keyakinan dan toleransi menjadi sangat penting dalam menjaga kerukunan kehidupan beragama dan berbudaya. Toleransi tanpa iman akan membuat orang menjadi liberal. Namun, keyakinan atau iman tanpa toleransi akan membuat orang menjadi fundamentalis, keras, dan kasar.

Hasyim menambahkan, konflik antarumat beragama tak hanya disebabkan masalah agama. Faktor geopolitik, ideologi, sosial, dan ekonomi juga menentukan.

Hasyim menambahkan, di Bandung atau Bogor, Jawa Barat, mendirikan gereja lebih sulit dibandingkan dengan di Magelang atau Tembung, Jawa Tengah. Hal itu terjadi karena faktor geopolitik di tingkat lokal. "Dari mana ia menjadi kepala daerah dan karaktersi apa saat menjadi kepala daerah akan menentukan kebijakan kepala daerah," katanya.

Secara terpisah, sejumlah to-

kok agama, Senin, bertemu dengan pimpinan MPR. Tokoh agama itu menilai, kekevasan atas nama agama, seperti yang terjadi di Cikotik dan Tembung, mengancam kehidupan berbangsa di Indonesia. Pemerintah perlu tekatan tak satu pun dalam mengatasi masalah ini.

"Kami pelisah dengan kondisi kebangsaan serta kebebasan yang rapuh dan terancam," kata Zamrud Arifah Chafsoh (Yenny Widhi) dalam pertemuan dengan pimpinan MPR itu.

Dari Pasuruan, Jawa Timur, Selasa, dilaporkan, Yayasan Pesantren Islam Al Ma'adul (Yapi) di Kecamatan Beji Jember masa. Enam santri pesantren dengan pakaian syah ini terbuak dan dikucikan ke rumah sakit di Malang.

Kepala sekolah SMP dan SMA Yapi Muhammadiyah Al Ridho menuturkan, penyerang berjumlah 200-an orang. Sekitar 50 penyerang masuk ke kompleks dan saat itu dibuang sekitar 30 santri.

Kepala Pokda Jatin Inspektur Jenderal Radrudin Haki menyatakan, tiga pelaku penyerangan ditangkap dan masih dipenitka (ETA/ER/DA/WA/AT/EDN/ADR/IAM/INQ/NWQ/LOR/WIY).

Intelijen Kurang Profesional

Menteri Dalam Negeri Berdialog dengan FUI, MUI, dan FPI

JAKARTA, KOMPAS – Terjadinya kerusuhan di beberapa tempat di Indonesia tidak terlepas dari kurang profesionalnya kerja intelijen di negeri ini. Namun, intelijen tak dapat serta-merta disalahkan.

Pembaca itu disarankan mengamati intelijen C Mawabang dan Susantingus Kerbonati secara terpisah di Jakarta Rabu (16/2).
"Intelijen hanya pengumpul data atau informasi, lalu memberikannya kepada pimpinan atau sebagai acuan pengambilan keputusan. Bila laporan intelijen tak dianggap secara sungguh-sungguh oleh *chief of state*, pemerintah siapa kerjanya," kata Susantingus, dosen Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, yang menulis disertasi tentang komunikasi organisasi intelijen.



DK 0009 4865

FACE ALGAHALS

Intelijen melibatkan pengumpulan informasi di lapangan dengan benar, atau tak benar, tetapi ia tidak berdiri sendiri. Jika data yang diserahkan kepada *chief of state* benar, dalam hal ini kepala negara, intelijen laporan itu tak dianggap serius, tak peduli. Jika bukan lamban, bisa saja masalah intelijen. Ada organisasi intelijen yang membunuh intelijen."

Insiden di Cikesehi, Kabupaten Pandeglang, Banten; Kabupaten Tembung, Jawa Tengah

Isi memuat halaman, "Bisa saja (Dorombang ke hal 19 kol 6-7)

Intelijen Negara

Merurut Kepres No 103/2001

Pangsi Tugas

- Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang intelijen
- Penyelenggaraan produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan pemerintah
- Perencanaan dan pelaksanaan operasi intelijen
- Koordinasi kegiatan operasional dalam pelaksanaan tugas
- Disiplin dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang intelijen

Wawancara



- "Pengawasan dan pembinaan secara mutlak di bidangnya"
- Penyelenggaraan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
- Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan tersebut di bidang intelijen
- Penyelenggaraan sistem informasi nasional dan sistem pengamanan sipil nasional di bidang intelijen

Sumber: Kompas

Merurut RRU Intelijen Negara

Lembaga Koordinasi Intelijen Negara

- Melakukan pengkajian dan perencanaan kebijakan nasional di bidang intelijen
- Melakukan perencanaan dan pelaksanaan operasi intelijen
- Menfasilitasi dan membina kegiatan intelijen di instansi pemerintah
- Menyediakan bahan pertimbangan kepada pimpinan dalam pengambilan dan strategi nasional
- Menkoordinasikan aktivitas kontra-intelijen dan pengamanan bank di dalam negeri maupun luar negeri
- Melakukan rencana dan kebijakan nasional di bidang intelijen secara menyeluruh
- Menyelenggarakan intelijen bagi Kementerian, Lembaga pemerintah non departemen, atau instansi sesuai kewenangan dan tugasnya
- Melakukan kerja sama dengan lembaga negara lain
- Menkoordinasikan tingkat-tingkat intelijen pada masing-masing intelijen negara

BERKAWAN

Intelijen Kurang Profesional

(Sambungan dari halaman 1)

dan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menurut Susaringtyas, karena ada ego sektoral di masyarakat. Ada kelompok yang merasa lebih benar atau lebih penting.

"Intelijen perlu mengadakan penggalangan tokoh masyarakat. Jika penggalangannya tepat, persoalan bisa diatasi. Fungsi intelijen adalah deteksi dini," katanya.

Jika petugas intel memiliki kemampuan kerja yang kompeten, menurut Susaringtyas, ia bisa menggalang dan memengaruhi tokoh lokal. Penggalangan itu tidak bisa terjadi tiba-tiba, membutuhkan biaya, dan membutuhkan proses. Karena itu, petugas intel dituntut memiliki jaringan luas dan ketepatan analisis dalam menghadapi ancaman faktual, faktor korektif kriminogen (faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan), serta *power hazard* (kejadian/potensi dalam masyarakat yang mengandung kerawanan).

Manullang mengakui, "Intelijen kita kurang lengkap mengetahui, Banten rentan dalam hal ancaman negara. Di provinsi ini, menurut laporan luar negeri, termasuk paling lengkap aktivitas Islamnya. Hal akurat itu kurang dipantau. Padahal, intelijen itu harus akurat baik waktu maupun informasinya."

Menurut Manullang, intelijen dahulu lebih profesional. Mereka bekerja tanpa diketahui orang lain, "Kaku sekarang malah menunjukkan diri biar orang lain takut, Sok-sokan," katanya.

Ia pun mengungkapkan, DPR turut berperan dalam pelemahan intelijen saat ini karena tak memiliki undang-undang (UU). Lebih celaka lagi karena belum ada UU Kerahasiaan Negara.

Mengenai kasus Cikusik, Manullang mengungkapkan, peristiwa itu bukan masalah agama,

Agama telah diideologikan dan ideologi sukses pula digamakan. Ia menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti aparatnya, terutama yang terlibat pengideologian agama.

Manullang pun membandingkan penanganan gerakan Islam pada zaman Soeharto dengan saat ini. Soeharto menilai, gerakan Islam saat itu berbahaya. Ia pun tak mengangkat pejabat yang terindikasi terlibat gerakan Islam.

Semoga tak berhubungan

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Rabu di Jakarta, mengakui. Puri kini bekerja untuk mencari tahu apakah penyerangan terhadap sebuah pondok pesantren di Pasuruan terkait dengan insiden kekerasan sebelumnya di Cikusik dan Temanggung. "Namun, sudah-sudah tak ada hubungannya dengan peristiwa yang lain," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berpendapat, seperti ada skenario di balik kekerasan yang terjadi belakangan ini. Namun, ada atau tak ada skenario, insiden itu harus diusut dan diproses secara hukum.

"Saya tidak mudah menerima penjelasan apabila itu dilakukan spontan. Saya cenderung mengatakan, beberapa kejadian kekerasan belakangan ini terjadi dengan tak spontan. Ada semacam rangkaian," ujar Anas. Selasa malam, sebelum membuka dialog dengan Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara di Jakarta,

Ia menyatakan, jika betul rangkaian kekerasan belakangan ini tak terjadi secara spontan, berarti ada pihak yang merumuskan skenario dan menggerakkan massa. "Itulah sebabnya intelijen negara harus bekerja untuk menemukan apa sesungguhnya yang terjadi," tutur Anas.

Rabu di Jakarta, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin

juga meminta aparat segera menangkap aktor di balik kekerasan berlatar agama, seperti di Cikusik, Temanggung, dan Pasuruan. "Kami berharap ketegasan pemerintah. Tindak tegas pelaku, siapa pun dia," katanya.

Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Jerry Samampouw juga menegaskan, tugas pemerintah, khususnya kepolisian, adalah mengungkap dan menjelaskan kepada publik siapa yang ada di balik kekerasan itu. Hal ini dirasa penting untuk menunjukkan pemerintah masih ada dan berfungsi.

Bertemu Mendagri

Rabu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bertemu dengan tokoh organisasi massa Islam, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Ridwan, Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Ustaz Muhammad Al Khathath, Achmad Sumargono, Panglima Laskar Islam Munawar, dan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Riziq. Pertemuan tertutup itu, menurut Gamawan, hanya dialog tentang peran organisasi kemasyarakatan ke depan.

Habib Riziq, sesuai acara, menonjolkan, terkait dengan Ahmadlyah, FPI, MUI, dan FUI memiliki kesamaan sikap, yaitu membaratkan Ahmadlyah dan mengembalikan pengikutnya kepada Islam. Namun, Gamawan menyatakan, pemerintah masih mendengarkan masukan dari pihak lain.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Banten Ajun Komisaris Besar Gunawan menyebutkan, hingga Rabu, Polri menahan enam tersangka terkait dengan insiden Cikusik. Mereka adalah UJ, YA, KE, KM, M, dan S. Jumlah tersangka masih mungkin bertambah.

(WIN/INA/ATO/LOK/
ANA/EGI/CAS/WHY)

Negara Perlu Lebih Proaktif

Iklm Investasi Tidak Hanya Butuh Faktor Keamanan

JAKARTA, KOMPAS — Negara harus lebih proaktif dalam menuntaskan penanganan ketidakamanan yang berpotensi mengganggu iklim investasi. Bertindaklah tegas secara nyata, tidak sekadar bicara dan berkomitmen. Investor asing dan dalam negeri sangat membutuhkan jaminan keamanan.

Kalangan pengusaha di Jakarta, Rabu (16/2), mengemukakan pentingnya jaminan keamanan dari negara pasca-tindakan anarkis yang terjadi di Banten, Tembungung dan Pasuruan. Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Sutrisno mengatakan, "Investor sekarang ini hanya bisa bersikap *wait, worry and see*. Bukan *wait and see* lagi. Zaman keamanan dalam usaha adalah kunci utama bagi investasi."

Menurut Benny, investor saat ini bertanya-tanya tentang akhir penuntasan konflik horizontal

ini. Pemerintahan ini adalah lembaga yang *leghitimate*. Maka, bertindaklah sebagai pemerintahan yang sah. Jangan menambak dalam menyelesaikan masalah.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Smit mengatakan, pemerintah harus konsisten dalam menjamin keamanan. Jangan menganggap remeh setiap persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Konflik yang terjadi di Banten, Tembungung, dan Pasuruan bukanlah semata-mata masalah SARA, melainkan sebagai ma-

salah keagamaan sosial. Bertindaklah tegas supaya investor merasa terjamin aset-asetnya di negeri ini," ujar Anton.

Menurut Anton, kesenjangan kaya dan miskin yang terwujud dalam membengkaknya angka pengangguran bisa jadi menjadi pemacu. Investasi yang diklaim naik oleh pemerintah rupanya tidak mengindahkan pola investasi di bidang manufaktur yang mampu menampung banyak tenaga kerja.

Struktur angkatan kerja yang bergerak di sektor informal saja bisa mencapai 70 persen, sedangkan sisanya 30 persen berada di sektor formal.

"Banyaknya sektor informal dahulu dianggap oleh pemerintah sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi ini tidak boleh dipelihara," kata Anton.

Sikap proaktif pemerintah dinilai perlu dibuktikan dalam penyelesaian lapangan kerja. Tidak

bisa negara selamanya mendatangkan devisa dengan mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Kompetitif

Selain faktor keamanan, Penasihat Dewan Gubernur Bank Indonesia Bidang Riset Kerja sama Ekonomi Internasional Sjaamsul Arifin memendang prosedur pengurusan izin yang berbelit-belit dan pesannya infrastruktur yang tidak memadai juga membuat iklim bisnis di Indonesia semakin tidak kompetitif. Padahal, potensi yang dimiliki sangat besar, terutama sektor pariwisata, jasa kesehatan, dan jasa penerbangan.

"Lingkungan bisnis yang akan menarik investor dalam dan luar negeri. Produktivitas tenaga kerja masih rendah. Sayangnya Indonesia lebih banyak belajar dari Singapura," kata Sjaamsul.

Menurut dia, mengacu pada survei Bank Dunia, iklim bisnis di Indonesia menempati peringkat ke-121 dari 183 negara yang disurvei pada tahun ini. Peringkat tersebut menurun dibandingkan dengan peringkat tahun 2010, yakni peringkat ke-113.

"Hal itu seharusnya menjadi sinyal peringatan bagi semua kalangan terkait. Jangan sampai iklim bisnis semakin terprotek lagi," katanya.

Sjaamsul mengatakan, Indonesia sebenarnya memiliki banyak faktor produksi, tetapi tidak ditrigemkan dengan baik. Ia mencontohkan Thailand yang saat ini tengah mengintegrasikan keunggulan pariwisatanya dengan pariwisata kesehatan.

Selain Thailand, negara lain yang juga bisa menjadi sumber inspirasi adalah Singapura. Negara tersebut menempati peringkat pertama dalam urusan iklim bisnis. (RNY/GSA)



Pemerintah Harus Lebih Tegas

DPR Berdialog dengan Tokoh Lintas Agama

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta untuk bersikap lebih tegas dalam menerapkan hukum terkait terjadinya berbagai kekerasan akhir-akhir ini. Pelaku kekerasan itu harus ditindak sesuai aturan hukum yang ada dan keselamatan serta kebebasan masyarakat semestinya dilindungi.

Desakan itu dikemukakan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jilmy Aschididqie, dan KHI Sahabuddin Wahid dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang Jawa Timur, di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis (2/2). Mereka me-

nyatakan, kasus kekerasan yang ber-tanggung jawab-akhir-akhir ini bermuara pada lemahnya pemerintah dan hukum yang tak jalan. Dalam situasi itu, masyarakat coba mengambil jalan keluar sendiri, termasuk leyak kekerasan.

Jilmy menilai, tak hanya peme-gakan hukum yang lemah, tetapi

seluruh sistem pemer-intahan di negara ini juga tak berjalan mak-simal. Itu terjadi ka-rena faktor kepemimpinan yang tak ber-fungsi baik. Hal itu bi-sa berakibat.

Selanjutnya kasus ke-kerasan, menurut dia, pemerintah segera siuk mem-predatkan bagaimana mem-perbaiki undang-undang (UU). Padahal, semestinya segera ambil tindakan, tangkapi pelaku ke-kerasan, dan tegakkan hukum.

Pemerintah juga dikesak ber-sikap tegas terhadap kelompok atau organisasi yang nyata-nyata



berbuat kerusakan. Itu dilakukan melai-ki pengadilan yang terbuka dan adil de-ngan memberikan hak kepada keform-pok itu untuk mem-bela diri. Langkah ini harus diproyeksi se-hagai proses yang paling baik. "Pemerintah segen-ah bertindak. Kurang agresif, banyak bekerja," katanya.

Jusuf Kalla menegaskan, jika pemerintah sekarang dinilai le-mah menghadapi berbagai ke-kerasan, jalan keluarnya adalah perlu memperkuat diri. Caranya dengan menegakkan hukum se-

suai dengan aturan yang ada. "Ada aturan hukum soal penga-layaan atau pembunuhan. Lak-sarakan saja. Siapa yang melang-gar, ambil tindakan hukum," ka-tanya.

Tak boleh menghukum

Sejumlah tokoh lintas agama, termasuk Jusuf Kalla, Kamis ma-lam, juga berdialog dengan Ka-misi VIII DPR. Dalam dialog itu terungkap, negara tak bisa meng-abaikan keyakinan atau ideologi

@Bersembang ke hal 15 kol 3-5)

BACA JUGA HAL 5

Dokter Gali Mereka yang Manau...

Pemerintah Harus Lebih Tegas

(Sambungan dari halaman 1)

seseorang. Negara juga tidak bisa menetapkan suatu aliran tertentu sebagai sesat atau tidak.

Dalam rapat dengar pendapat umum itu, tokoh lintas agama juga memunculkan kerukunan umat beragama di negeri ini yang rentan karena posisi negara kadang tak hadir ketika dibutuhkan untuk menegakkan hukum.

Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Koesling mengakui, DPR segera meminta pendapat tokoh agama, salah satunya untuk merumuskan konstruksi kerukunan umat beragama. Terlebih ada niat DPR menyusun UU tentang kerukunan umat beragama.

Menurut Jusuf Kalla, kebanggaan seharusnya menjadi dasar rakyat Indonesia bernegara. "Kalau bicara kerukunan, berarti bicara bagaimana melaksanakan dasar yang kita setuju dari awal. Perbedaan yang membuat bangsa ini besar. Jangan hukum orang karena pikiran atau ideologinya, tetapi hukum karena tindakannya," katanya.

Jusuf Kalla mengingatkan, pemerintah harus tegas menghukum pelaku insiden terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikensik, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan Kabupaten Tembungung, Jawa Tengah. "Kalau terjadi pembiasaan, nanti ada anggapan, kalau kita hukum orang rasmi-rasmi, bisa bebas dari hukum. Ini yang berbahaya. Jika terjadi konflik antaragama, berbertanya selit," katanya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengatakan, Islam mengakui toleransi (toleransi) terhadap perbedaan pendapat. Namun, MUI berpandangan, Ahmadiyah berada di luar wilayah perbedaan yang bisa ditoleransi sehingga dinilai sesat. Untuk memindahkan jodi kesesatan itu, MUI menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Ma'ruf menepis anggapan bahwa kekerasan kepada jemaah Ahmadiyah terjadi karena fatwa

MUI yang menyebutkan Ahmadiyah merupakan aliran sesat. MUI tidak menoleransi kekerasan oleh siapa pun.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masdar F Mas'udi mengatakan, terkait Ahmadiyah, PBNU hanya menyatakan, aliran itu tidak sesuai dengan paham *al-his samaah wal-jannah* yang diajarkan warga NU. NU tak menggunakan kata sesat. "Kami berpandangan, yang berhak menyatakan sesat atau tidak itu hanya Allah," ujarnya.

Menurut mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra, Indonesia tidak bisa menghukum orang karena keyakinan yang dianutnya. Indonesia bukan negara agama. "Apabila Malaysia menetapkan aliran yang menyimpang, seperti Darul Arqam, Syiah, sampai Ahmadiyah, wajar karena negara yang berlandaskan agama. Islam menjadi agama resmi mereka. Namun, di Indonesia, tidak ada agama resmi negara," katanya.

Benny Susetya dari Konferensi Wali-gereja Indonesia menambahkan, selama ini pemerintah cenderung absen dalam memberikan rasa aman terhadap warga negaranya. Tokoh agama yang sering haus menjadi "pemadam kebakaran" ketika terjadi kekerasan yang mengatasnamakan agama. "Kami tidak ingin terus-menerus jadi pemadam kebakaran. Pemerintah jangan bermain api terus," katanya.

Tak cepat tanggap

Sebaliknya, Salahuddin Wahid di Komnas HAM menyatakan prihatin dengan lemahnya sistem intelijen dan respons pemerintah dalam menindaklanjuti data dari intelijen itu. Sebab, mungkin intelijen sudah memberikan laporan gejala kerusuhan atau kekerasan, tetapi kepolisian tak cepat tanggap. "Aparat keamanan, dalam hal ini Polri, mungkin tidak siap mengatasi keadaan atau menangkap ereteng," katanya.

Situasi itu terjadi akibat pe-

ngembangan sistem intelijen masih lemah. Mungkin saja jumlah sumber daya manusianya terbatas, dana sedikit, atau kurang profesional kurang. Polri harus menginvestigasi kenapa kekerasan itu terjadi dan bagaimana memperbaiki sistem antisipasinya. Kemampuan deteksi dan intelijen mesti diberdayakan agar bisa mencegah kasus kekerasan serupa.

"Perbaiki sistem intelijen ini penting. Rakyat kan sekarang sudah merasa tidak dilindungi oleh kepolisian. Jika dibiarkan begini terus, pemerintah akan semakin kehilangan wibawa," katanya.

Secara terpisah, Menteri Pertahanan Purnomo Yusrilantoro mengingatkan, TNI akan turun tangan menindak massa anarkis. "Aksi kekerasan oleh massa menimbulkan keprihatinan TNI. Polisi berada di depan dan tentara memberikan dukungan. Namun, kalau keadaan tidak bisa diatasi, tentara akan masuk menindak massa anarkistis," ujar Merhan di Jakarta, Kamis.

Purnomo mengajak seluruh komponen bangsa bersatu menolak dan meniadakan kekerasan yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Aparat penegak hukum bersama tokoh masyarakat agar memcernahi masalah yang mengganggu stabilitas.

Dari Pandeglang, Kamis dilaporkan, tersangka kasus Cikensik yang ditahan di Polda Banten menjadi tojok orang Tersangka baru. U, ditangkap di Bagan, Jawa Barat.

Kepala Bidang Humas Polda Banten Ajun Komisaris Besar Guwanan mengatakan, Polri masih mengejar sejumlah calon tersangka lain. Enam tersangka, selain U, yang kini ditahan, adalah Uj, YA, KE, KM, M, dan S.

Terkait penyerangan Pondok Pesantren Al Ma'hadil Islam Yayasan Pesantren Islam Pasuruan, Jawa Timur, jumlah tersangka menjadi enam orang, yaitu I, HS, S, AM, US, dan HA.

(LAM/BIL/ATI/ONG/WHY/HAR/CAS/EIA/EG/NTA)

Membangun Toleransi sejak Dini

Kekerasan banal di Cirebon, Pandeglang, Banten, dua pekan lalu, disusul kekerasan di Temanggung, Jawa Tengah, meninggalkan ingatan kelam pada banyak orang. Juga pertanyaan, mengapa kekerasan yang menegut nyawa masih terus terjadi dengan mengatasnamakan agama.

Kekerasan yang hadir di ruang keluarga melalui media televisi tersebut seperti mendidihkan kerja mereka yang terus memelihara harmoni dalam perbedaan di masyarakat. Ironisnya, sejumlah pelaku kekerasan banal berasal dari daerah tempat tinggal korban, bahkan ada dugaan kekerasan itu terorganisasi.

Pada, di akar rumput kerukunan adalah kerisayuran ketika warga berniat membangun dialog terbuka. Seperti dilakukan Faris Cicik di Laskonoba, Jember, Jawa Timur dengan membangun dialog mendampingi kelompok belajar masyarakat yang berfokus pada anak usia SD dan SMP. Kelompok belajar Tanaker (berpusat di bahasa Madura) ini mengajak anak-anak mengenal keberagaman budaya sejak dini melalui bermain dan belajar. Kegiatan ini berjalan sekitar dua tahun dan sejauh ini berhasil membangun toleransi.

Dua sebagian besar anak-anak itu menjadi TKI, bahkan ada yang ayah dan ibunya sama-sama menjadi buruh migran. Melalui anak-anak ini, orang tua atau orang tua mereka juga belajar mengenai toleransi.

Bukan hanya mengenal perbedaan di antara sesama anggota komunitas atau dengan anak dari kampung di sekitar, melainkan juga mereka belajar mengenai anak-anak dari bangsa yang berbeda ketika mereka dikunjungi siswa sekolah asing.

"Kami ingin Tanaker tumbuh menjadi komunitas terbuka. Di tengah masyarakat

kat yang diliputi intoleransi, komunitas Tanaker bisa diterima karena kami melakukan dialog," kata Cicik. Dia saat ini mendampingi 150-an anak di Tanaker.

Keajaiban bersama

Untuk menjaga Indonesia yang keadaban adalah keberagaman, Cicik berkeyakinan komunikasi terbuka harus diajarkan sejak anak-anak. Para pendamping informal maupun guru di sekolah perlu mendapat bekal dan membangun pemahaman keberagaman.

Dalam kegiatan sehari-hari, sering kali kekrangterampilan guru dan orangtua menjadi penyebab tak berkembangnya keharmonisan memelihara perbedaan pada anak-anak.

Cicik, yang juga peneliti agama dan perubahan sosial, memfokuskan dalam penelitiannya sepanjang 2007-2008 di 30 sekolah menengah atas di sejumlah kota di Jawa, memusatkan toleransi atas perbedaan, keputusan tanpa nilai, serta tidak menghargai paham kebangsaan jama'at di sekolah melalui pendirian ekstrakurikuler kerukunan. Cara mengajar dengan menggunakan idiom mampu menyamakan anak didik tersebut, bahkan lalu menginspirasi guru dan menjadi orangtua.

"Alhamdulillah saat ini ada pelatihan untuk guru-guru yang akan melatih guru-guru lain tentang keterbukaan, keberagaman budaya, dan peka jender," kata Cicik tentang pelatihan yang digelar Semarang Corland Nusa dan YLHH itu.

Retika Kiman, Perwakilan Anak Indonesia Maria U'ah Ambarer menyayangkan kekerasan yang terjadi atau nama agama karena pengaruh buruknya tagg anak-anak. Bukan hanya akan terasuma pada kekerasan itu sendiri, melainkan tanpa penindakan tegas terhadap pelaku kekerasan anak akan belajar kekerasan di sekolah untuk menghadapi mereka yang berbeda.

Yang juga merisaukan Maria U'ah adalah anak-anak akan belajar kebencian kepada yang berbeda. Padahal, Indonesia ada karena toleransi dari yang beragam. "Apalagi anak-anak yang komunitasnya menjadi sasaran kekerasan. Selain trauma, mereka juga harus mengungkap dan terbiasa dari temannya. Ingatan itu

akut merokok lama dan dalam pada anak-anak," kata mantan Ketua Umum Fatayat NU, itu.

Bagi perempuan, kekerasan juga berdampak dalam. Bila pada berbagai kejadian kekerasan seksual dapat melarikan diri dari jejak masa, perempuan biasanya tinggal karena harus bertanggung jawab terhadap anak-anak dan anggota keluarga lain.

"Perempuan harus menyembuhkan trauma anak-anak dan dirinya sendiri dan menghadapi stigma yang diletakkan pada korban. Bisa suami meninggal dalam peristiwa

kekerasan, belum dikurangi otomatis akan jatuh pada perempuan," tambah Maria.

Tanggung jawab bersama

Untuk menjaga keutuhan negara-bangsa Indonesia, Cicik menambahkan pentingnya tanggung jawab bersama. Kelompok yang minoritas harus membuka diri, sementara kelompok mayoritas harus merangkul.

Perlu organisasi kemasyarakatan besar saat ini, yang cenderung lebih berpolitik, tidak banyak membantu merekat perbatasan bangsa. Organisasi-organisasi besar, demikian Cicik, cenderung melupakan pendidikan kebangsaan pada akar rumput.

Otomatis daerah juga ikut andil menyebabkan ketegangan di masyarakat. Rakyat harus menjadi komunitas politik saat menjelang pilkada, sementara pendidikan politik kewarganegaraan tidak berjalan. Syahwat politik yang besar itu melupakan dari ancaman terhadap persatuan Indonesia yang menyempit melalui pendidikan di sekolah dalam bentuk kreativitas dan moralitas. (NINUK MP)



TOLERANSI

Membela Hak atas Kerukunan

Pekan Kerukunan Beragama 2011 yang dibuka Minggu (6/2) oleh Wakil Perwaja serangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cirebon, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2) dan akan musyawarah yang menarik tips gereja dan satu sekolah di Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (8/2).

Serangan di Cirebon, menyebabkan tiga orang tewas dan lima orang luka parah. Prasyarat dan kebebasan beragama kekerasan dan membatalkan di Temanggung. Seruan para tokoh agama di Indonesia tentang dialog antaragama dan budaya, pendidikan, penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan sebagai utamanya. Ruang mereka sempat dibulan pernyataan provokatif pejabat dan tokoh politik yang membatalkan bahkan mengancam kerukunan (mendukung).

Keluhan situasi ini terus dibuktikan, prinsip kerukunan beragama di Indonesia semakin "ajar intelektual muda Nahdlatul Ulama yang juga komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, Neng Dara Affah.

Laporan Institut Setara, lembaga kajian demokrasi dan perdamaian, pada 2007-2008 menunjukkan terjadinya proses pemerintah membatalkan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan secara normatif diadukan konstitusi, khususnya Pasal 28 F, Ayat 1 dan 2 UUD 1945, UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UU No 12/2005 tentang Penghapusan Komens Internasional Hak Sipil dan Politik. Namun, politik pembatasan dilakukan melalui Pasal 28 J (2) UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang diskriminatif.

Banyak kasus menyempit di sepanjang 2008. Di antaranya,

upaya pembongkaran patung Buddha di Vihara Tri Ratna di Temanggung; pembongkaran pertunjukan wayang oleh kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu di Sukoharjo, Jawa Tengah; penutupan peternakan ayam di Ngaras, serta di pantai masuk real estat di Bekasi, selanjutnya penutupan HIMP di Cirebon; dan serangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Manis Lur, Cirebon.

"Toleransi pemerintahan SBY pada kelompok yang melakukan kekerasan atas nama agama lebih besar daripada pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri," tegas aktivis pelepasan hak seni manusia, Usman Hamid.

Bahkan, laporan Institut Setara 2010 menunjukkan pengungkapan beberapa pejabat tinggi negara akan melakukan negosiasi ini, termasuk 12 tindakan mendukung oleh tokoh publik, enam di antaranya oleh Menteri Agama.

Marginalisasi dan kekerasan
Penyempitan terhadap komunitas tertentu karena agama dan keyakinanannya selalu berujung pada perampasan dan anak dalam bentuk marginalisasi dan kekerasan, seperti terjadi khususnya pada kelompok Ahmadiyah di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.

Menurut Neng Dara, mereka menjadi objek kekerasan seksual, pengucilan, kolaborasi akses ekonomi dan status kependudukan, serta mengingkari gagasan keadilan. Reproduksi kebencian terjadi di antara sesama anak yang juga didiskriminasi dalam pendidikan dan berprestasi merupakan trauma akibat pelecehan.

Retika Kiman Perempuan Yanti Chuzadali mengatakan, tiga tahun terakhir tercatat 342 kali serangan terhadap komunitas Ahmadiyah. Laporan Institut Setara memperlihatkan, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selama tiga tahun terakhir sampai tahun 2009 paling banyak menimpa komunitas Ahmadiyah.

"Tahun 2010 pelanggaran terbanyak menimpa jemaah Kristiani," ujar peneliti senior Institut

Setara, Ismail Hamani.

Kekerasan masa di tingkat komunal, menurut Neng Dara, menunjukkan kegagalan pemerintah melakukan pemertahan dan perdamaian terhadap warga negara. Dengan menambatkan label, sentimen terhadap identitas agama (dan etnis) selalu berpeluang dimanfaatkan kepentingan politik pihak tertentu. Di sisi lain, hak keberagaman kelompok yang terpinggirkan akan terus diabaikan.

"Tak seorang pun berhak mendefinisikan ketiadaan seseorang kecuali orang bersangkutan," tegas Neng Dara yang saat menerima pengungkapan pelanggaran HAM atas kasus perampasan itu.

Tengara polanya

Tantangan serius gerakan perempuan saat ini, menurut Koordinator Koalisi Perempuan Indonesia untuk Kualitas dan Demokrasi (KP) Wilayah Yogyakarta Parjanto A. Rosdella adalah mengaktifkan kerukunan warga untuk menolak kekerasan yang mungkin dipicu pihak luar kelompok.

"Praxis di Banten dan Temanggung adalah pelajaran berharga. Kita juga melihat bagaimana masyarakat Temanggung membela hak mereka atas kerukunan," ujar Parjanto.

Dokter antropologi lulusan Radboud Nijmegen Universiteit, Belanda, yang penelitian disertasinya di Maluku itu mengemukakan tentang pola sistematis untuk membangun ketertarikan dan prasangka yang berujung pada kekerasan terhadap masyarakat yang semula hidup rukun dan damai, seperti di Maluku Utara dan Paso.

"Kekerasan mengibaratkan semuanya, bukan hanya fisik, tetapi juga ingatan kolektif," ujar Neng Dara yang bersama KP wilayah Yogyakarta baru selesai mengorganisir pameran seni lincah dan ekspresi perempuan menolak kekerasan.

"Yang terpenting mengaktifkan kerukunan dan tidak terpelembek pada posan pro dan kontra. Banyak hal ada-bukan dalam politik kekuasaan. Kita, perempuan, dipanggil untuk menyelamatkan kehidupan." (MARIA HARTININGSIH)

PENEGAKAN HUKUM

Pemerintah Masih Cari Titik Temu Ahmadiyah

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah masih mencari titik temu, dari berbagai pihak, dalam penanganan masalah Ahmadiyah. Apa pun keputusan pemerintah saat ini masih akan selalu ada kejidaksetujuan.

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Maninjau, Sukawati Barat, Jumat (18/2) di sela-sela mendampingi Wakil Presiden Boediono. "Ada yang melihat Ahmadiyah harus dibubarkan. Ada pula yang melihat, biar saja Ahmadiyah hidup," ujarnya.

Dalam rapat kabinet, Kamis lalu, menurut Gamawan, Polri menyampaikan kemajuan penanganan hukum dalam kasus kekerasan terhadap warga Ahmadiyah, terutama di Cikusik, Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat, dan kekerasan di Tembungung,

Jawa Tengah. Gamawan juga melaporkan kondisi terakhir setelah ia berdialog dengan Majelis Ulama Indonesia dan beberapa pengurus organisasi kemasyarakatan.

Gamawan menjelaskan, "Presiden memesintasikan agar langkah itu dilanjutkan walau penyelesaian tidak bisa diwujudkan dalam waktu pendek." Ia juga diminta terus berdialog dengan berbagai pihak sampai diperoleh titik temu.

Tuntut pembubaran

Di Jakarta, Jumat, massa dari sejumlah organisasi massa Islam berunjuk rasa di Bundaran Hotel

(Bersambung ke hal 15 kol1-4)

BAÇA JUGA HAL 5

Perlindungan Minoritas...

Pemerintah Masih Cari Titik Temu Ahmadiyah

(Sambungan dari halaman 1)

Indonesia. Mereka meminta pemerintah membatalkan Ahmadiyah. Pengunjuk rasa mengancam akan menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika tuntutan mereka tidak dipenuhi pemerintah.

Organisasi yang berunjuk rasa, antara lain, Forum Umat Islam (FUI), Jemaah Anshoran Tambora, Front Pembebasan Islam (FPI), Gerakan Reformasi Islam, Syarikat Ikhwan, serta Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid In-

donesia. Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al Khatibath mengatakan, wujud rasa itu hanya pemaksaan. Untuk rasa memuat pembubaran Ahmadiyah akan digelar lagi awal Maret di depan Istana Negara. Pemerintah diberi waktu sampai 1 Maret 2011 untuk menyetujui keputusan pembubaran Ahmadiyah.

Ketua FPI DKI Jakarta Salim Alatas mengatakan, pemerintah bisa menghadapi ancaman dari umat Islam jika tak segera membatalkan Ahmadiyah. Namun, ia membantah jika dikatakan FPI

akan melakukan kekerasan.

Sebelum terpisah, Ketua Fraksi Partai Pesisiran Pembangunan (F-PPP) DPR Haerul Azwar menuturkan, fraksinya akan meminta Presiden Yudhoyono membatalkan Ahmadiyah. Pembubaran itu dipercaya sebagai jalan keluar untuk menbenarkan konflik horizontal di masyarakat.

"Ini sikap resmi F-PPE" katanya. "Tak perlu lagi dialog Konflik akan selesai jika Ahmadiyah dibubarkan," ujar Haerul. F-PPP DPR juga berpendapat, FPI adalah aset bangsa.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Muladi menilai, ancaman menggulingkan Presiden Yudhoyono tak otis. Namun, pernyataan itu tidak melanggar norma hukum. Kalimat ancaman itu ditindaklanjuti dengan pemufakatan jabatan, ancaman itu baru dapat dikategorikan makar dan bisa dipidana.

Juru Bicara Kepresidenan Julian A. de la Basha menyatakan, belum ada respons langsung dari Presiden tentang ancaman pengulangan itu.

WTO/BL/NTA/FER/WIDY/ICD



KEBERAGAMAN

Perlindungan Minoritas sebagai Patokan

Dalam laporan bersama International Federation for Human Rights dengan Imparsial dan KontraS, tentang kondisi hak asasi manusia di Indonesia pascacatbangnya rezim Orde Baru, terdapat satu bab yang mengulas kondisi kelompok minoritas di Indonesia yang diberi judul "Awan Gelap di Cakrawala".

Tentu saja ini hanyalah klasifikasi bahwa betapa dalam beberapa tahun terakhir kelompok minoritas di Indonesia, utamanya dalam hal keyakinan, menjadi kelompok yang rentan menjadi sasaran kekerasan.

Laporan tahunan United States Commission on International Religious Freedom pada 2010—yang juga dikutip dalam laporan bersama International Federation for Human Rights (IFHR) dengan Imparsial dan KontraS—selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kelompok agama minoritas telah mengalami pelecehan, intimidasi, diskriminasi, dan bahkan kekerasan oleh kelompok-kelompok yang intoleran dan garis keras, di bawah bendera Islam ortodoks.

Alih-alih menyelesaikan masalah kekerasan terhadap kelompok minoritas, negara malah justru sering menjadikan korban sebagai pihak yang dipersalahkan. Laporan IFHR bersama Imparsial dan KontraS menyatakan, jika pemerintahan terus menegakkan terjadinya kekerasan semacam ini, semestinya mereka harus menghentikan pola kekerasan, bukan malah membahayakan hak-hak kelompok yang menjadi korban kekerasan.

"Tetapi, mereka yang menjadi korban kekerasan pada akhirnya justru menjadi pihak yang dipersalahkan," kata peneliti Imparsial, Ratara Ibnu Faza. Dia menunjuk Ahmadlyah sebagai salah satu contohnya.

Peneliti IFHR, Anne-Christine Hubbard, PhD, mengatakan, seharusnya dalam negara yang menganut sistem demokrasi, seperti Indonesia, perlakuan negara terhadap kelompok minoritas menjadi *benchmark* (patokan) bagi pemerintahan terhadap warga negara secara keseluruhan.

Sebab, apa yang baik diterima kelompok minoritas itu, yang juga akan diterima seluruh warga negara. Perlakuan terhadap kelompok minoritas seharusnya menjadi *benchmark* dalam negara demokratis seperti

Indonesia," kata Hubbard.

Sayangnya, menurut Hubbard, dalam banyak kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas di Indonesia, yang terjadi justru ketiadaan negara untuk bisa menegakannya. "Aksi polisi sangat lambat ketika terjadi pelanggaran terhadap mereka. Seperti tak ada kewenangan negara untuk menegakkan pelanggaran hak-hak kaum minoritas," kata perempuan asal Perancis itu.

Dalam kasus kerusuhan di Tanjung Jawa Tengah, justru kelompok sipil seperti Gerakan Pemuda Anson, yang merupakan organ otonom organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), yang menjadi pelindung kelompok minoritas. Dalam banyak hal, organisasi sipil seperti NU malah slip menjadi pelindung bagi kelompok minoritas sebagai patokan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Kebinekaan

Reis Syuriah PBNU Masdar Farid Mas'udi mengatakan, pilihan tegas NU melindungi kelompok minoritas di Indonesia sebenarnya sejalan dengan semangat setia organisasi, yang sering dianggap tradisional ini, terhadap ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"NU sedari awal sudah bersumpah mendukung NKRI dengan segala kebinekaannya. Jadi, komitmen NU mengawal kebinekaan ini antara lain dengan memberikan perlindungan kepada yang lemah. Siapa pun kelompok yang lemah ini," ujar Masdar.

Bahkan bagi NU, perlindungan terhadap kelompok minoritas ini diberikan tak lagi berdasarkan diri pada ideologi atau latar belakang kelompok tersebut. Persoalan perwujudan ukhah atau kepatihan tak menghalangi NU untuk melindungi mereka. Ini semua demi ketuhanan NKRI. Tugas yang seharusnya juga diemban penguasa otoritas di negara ini.

(OKHAERUDIN)

TINDAK KEKERASAN

Tersangka Insiden Cikeusik Bertambah Jadi 9 Orang

SERANG, KOMPAS — Tersangka kasus Cikeusik terus bertambah. Pensiidik Kepolisian Daerah Banten hingga Jumat (18/2) menetapkan sembilan tersangka, yakni U, YA, E atau KE, KM, M, S, U, D, dan A. Kesembilan tersangka tersebut saat ini ditahan di Markas Kepolisian Daerah Banten.

"E ditangkap di Jakarta Selatan, sedangkan A ditangkap di Purwokerto," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Banten Ajun Komisaris Besar Gunawan di Serang, Banten, Jumat.

Berdasarkan penuturan Gunawan, dari jemaah Ahmadiyah belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. "Pemeriksaan anggota JAI saya dengar sedang berjalan, tetapi belum ada tersangka. JAI yang diperiksa sembilan orang. Deden sempat diminta keterangan, tetapi yang bersangkutan masih dalam kondisi lemah dan sakit akibat luka. Jaki yang bersangkutan masih keberatan diperiksa dengan alasan sakit dan hal itu dikuatkan dengan keterangan dokter," tutur Gunawan.

Profesi dan Pengumuman Polda Banten melakukan pemeriksaan internal berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menyelidiki apakah benar polisi tidak bekerja atau tidak profesional. "Sampai sejauh ini sudah diperiksa 14 saksi dan 5 orang terpesiksa. Mereka adalah anggota Polri yang terlibat penanganan pengumuman di lokasi pada hari Minggu (6/2)," ujarnya.

Sementara itu, kemarin 20 warga dari Desa Sigedong, Kecamatan Tretop, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menjelek anggota keluarga mereka yang ditahan di Markas Polda Jawa Tengah di Kota Semarang karena menjadi tersangka kerusuhan Temanggung.

Herni (22) terisak-isak setelah bertemu dengan suaminya, Hwan, tersangka pada kerusuhan Temanggung. "Suami saya tidak tahu apa-apa. Waktu itu dia hanya diajak pergi ke kota untuk melihat sidang," tuturnya.

(UPI/CAS/EGI/PER)

PASCA-KERUSUHAN TEMANGGUNG

Polisi Belum Sepenuhnya Ditarik

PURWOKERTO, KOMPAS — Kendati dinyatakan situasinya telah kondusif pasca-kerusuhan di Kabupaten Temanggung, Kepolisian Daerah Jawa Tengah masih menyiagakan personelnya di Temanggung untuk berjaga-jaga. Penarikan pasukan baru akan dilakukan jika kondisi dipastikan sudah benar-benar aman.

Kepala Polda Jateng Inspektur Jenderal Edward Antonang di Purwokerto, Sabtu (19/2), mengatakan, hingga kini dua satuan setingkat kompi (SSK) dari Brimob Polda Jateng masih ditempatkan di wilayah Temanggung. "Belum ada rencana penarikan pasukan. Saat ini, kami terus berupaya menertakan keamanan di Temanggung seperti saat sebelum terjadi kerusuhan," katanya.

Hingga kini, Polda Jateng sudah menetapkan 25 tersangka kerusuhan. Namun, dia mengakui, jumlah tersangka mungkin akan

bertambah sebab banyaknya saksi yang sedang diperiksa polisi.

Keolisian saat ini masih meminta keterangan awal 45 saksi terkait kerusuhan di Temanggung. Pihaknya tidak akan gegabah menetapkan tersangka baru dalam kasus ini. Polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka sehingga dapat ditemukan kedudukan dan tingkat keterlibatannya dalam peristiwa berbau SARA tersebut.

"Kami tidak bisa sembarangan mengubah status saksi menjadi tersangka. Harus ditemukan barang bukti ataupun saksi jika menetapkan tersangka baru," kata Edward.

Jajaran Polda Jateng kini masih terus menyelidiki aktor intelektual yang berada di balik kerusuhan Temanggung, Selasa (8/2).

Sikap pemerintah

Menteri Agama Suryadharma

Ali di sela-sela acara kunjungan kerjanya ke Kabupaten Temanggung, Minggu (20/2), mengemukakan bahwa menyangkut Ahmadiyah, pemerintah hingga kini belum bisa mengambil keputusan apa-apa.

Karena tidak ingin bersikap gegabah, pemerintah saat ini masih terus mempertimbangkan baik-baik setiap aspirasi yang masuk.

"Sejauh ini, kami menerima masukan yang demikian beragam. Ada yang menginginkan Ahmadiyah dibubarkan, ada yang ingin agar menjadi sekte sendiri, dan ada juga yang berkeinginan agar Ahmadiyah tetap dibiarkan berdiri," ujar Suryadharma.

Dengan banyaknya masukan tersebut, Suryadharma sendiri tidak bisa memastikan apakah keputusan terkait Ahmadiyah tersebut sudah bisa dirumuskan tahun ini atau tidak. (GRE/EGD)

KEKERASAN

Di Balik Api Konflik

Gelombang kekerasan berbasis agama terus terjadi. Aksi itu dipicu bukan saja oleh ikatan primordial, tetapi juga dipertajam pertarungan politik kelompok kepentingan.

Bagaimana menjelaskan berbagai kepentingan beroperasi di balik konflik berdimensi suku, agama, ras, dan antargolongan itu? Setidaknya, ada empat penjelasan yang bisa dipakai (Amirudin, dalam *Dipolitas*, 2008). Pertama, untuk kasus kekerasan di berbagai daerah sebelum dan sesudah Soeharto jatuh. Dikatakan bahwa aksi kekerasan ini mendapat sokongan dana dari elite Jakarta untuk kelompok kriminal di daerah. Kedua, pertarungan elite lokal dalam memperebutkan sumber daya ekonomi dan kekuasaan lokal. Ketiga, untuk konflik Dayak dan Madaya di Kalimantan, ada ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap kebijakan negara pada masa lalu yang membatasi akses etnis Dayak terhadap sumber daya lokal.

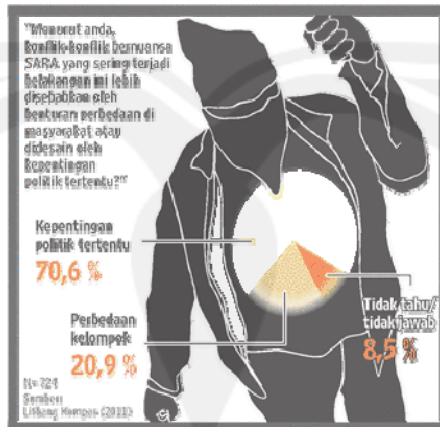
Keempat, mengikuti tiga penjelasan sebelumnya, kekerasan menjadi ciri periode transisi yang ditandai meluruhnya institusi-institusi negara akibat terjadinya perubahan secara terbuka terhadap pengalokasian sumber daya. Situasi ini dimanfaatkan kelompok-kelompok agama atau etnik untuk menegosiasikan ulang posisi politik mereka dalam bangunan berbangsa.

Bugaimanapun, mosaik keragaman etnis dan agama telah menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Namun, itu tidak dengan sendirinya meniadakan potensi konflik. Kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeseik dan peusakan gereja di Tembung mengemukakan hal tersebut. Situasi semakin rumit ketika negara gagal mengelola perbedaan dan konflik di masyarakat.

Pada hal, survei *Litbang Kompas* memperlihatkan sebagian besar responden (79,8 persen) menolak aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah. Ini berarti masyarakat masih melihat ruang-ruang dialog untuk menjembatani perbedaan yang ada. Langkah dialog yang ditempuh para pemuka lintas agama memperkuat keyakinan publik bahwa duduk bersama lebih produktif dibandingkan dengan cara kekerasan.

Tanpa penegakan hukum, kasus kekerasan akan terus berulang. Penegakan hukum pun perlu disikong pemikiran dari ide-ide kreatif yang mempromosikan toleransi antarkelompok. Pemikiran ini bisa dituangkan dalam berbagai medium, seperti tulisan, karya seni, film, musik, dan kurikulum pendidikan.

DOI PURWANTARI/LITBANG KOMPAS



BACKUP

PERLINDUNGAN WARGA

Kepala Polri Dinilai Gagal Jamin Hak Warga Negara

JAKARTA, KOMPAS — Rapor Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo selama 100 hari masa kepemimpinannya dinilai sejumlah kalangan masih meraba. Jajri Kepala Polri, yang dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Oktober 2009 untuk memantapkan sejumlah kasus besar yang menjadi perhatian publik belum terpenuhi. Kepala Polri pun gagal menjamin hak-hak warga negara.

Direktur Program Imparsial Al Arif di Jakarta, Senin (21/3), menyatakan, "Keamanan dan keselamatan warga negara, terutama di era kebebasan sipil, adalah ukuran penting keberhasilan demokrasi. Kapolri dinilai gagal karena terjadi banyak aksi kekerasan dengan dalih kepercayaan."

Imparsial menilai selama 100 hari kepemimpinan Timur tidak ada kontribusi positif dalam kerangka memulihkan perlindungan dan penegakan hukum yang sudah karni-marut. Timur gagal menjalankan 10 program penting yang dijanjikan, seperti kegagalan menyelesaikan kasus Gayus Tambunan, kasus penganiayaan terhadap aktivis ICWE, Tama S Langkun, dan kasus rekoning gendut pejabat Polri.

Menurut Al Arif, selama kepemimpinan Timur terjadi peningkatan intensitas kekerasan atas nama perbedaan agama dan keyakinan. "Peristiwa Cikensik dan Temanggung mengindikasikan kegagalan negara, melalui institusi kepolisian, melindungi dan membela hak asasi bagi masyarakat," katanya.

Imparsial berharap pergantian Kepala Polri baru dapat memperbaiki kinerja kepolisian dan memulihkan kepercayaan masyarakat

kepada. Namun, permasalahan yang membelit institusi Polri, baik secara internal maupun eksternal, sangat memengaruhi buruknya perlindungan serta penegakan hukum di Indonesia.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedy Pratomo, mengatakan, Presiden Yudhoyono harus mengevaluasi kepemimpinan Timur. Komisi III DPR nanti akan mempertanyakan jajri Timur saat uji kelayakan dan kepatutan.

"Belum ada secebis harapan yang diberikan Timur. Polri seperti jalan di tempat. Kami minta Kapolri memuat terobosan, tetapi yang terjadi menyelesaikan kasus Gayus sudah dua bulan ini seperti jalan di tempat. Citrus

Sinaga, yang katanya juga sudah jadi tersangka, juga belum jelas kelanjutannya," kata Trimedy.

Trimedy mengatakan, seharusnya Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

(UKP4) juga mengevaluasi kepemimpinan Polri. "Kapolri kan juga bagian dari pembantu Presiden. UKP4 harus ikut mengevaluasi kinerja kepolisian," ujarnya.

Menurut Koordinator Kontra Hasis Azhan, bagian dari evaluasi kinerja Kepala Polri adalah jajri Timur saat uji kelayakan dan kepatutan. "Tant uturnya kan banyak. Presiden bisa saja menyesuaikan agenda pemerintahannya dengan capaian Kapolri," katanya.

Imparsial pun menilai perlindungan serta penegakan hukum dan HAM di Indonesia disandera oleh institusi penegak hukum, termasuk kepolisian.

(BM/ONG)



DK 0009 4890

KERUKUNAN BERAGAMA

Negara Sering Tak Hadir

JAKARTA, KOMPAS — Negara dinilai sering tak hadir ketika terjadi persoalan menyangkut kerukunan umat beragama. Fungsi Kementerian Agama yang seharusnya membina umat agama meskipun fakta adanya ketertinggalan juga tak maksimal. Akibatnya di tingkat akar rumput sering terjadi persoalan menyangkut hubungan antarumat meski tokoh-tokoh agama rukun dan saling menghormati.

Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding dalam diskusi di Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Senin (21/2), mengatakan, ada kecenderungan yang membahayakan situasi harmonis dalam kehidupan beragama di Indonesia sekarang ini.

"Dari penelitian Setara Institute, selama 2010 ada 262 kasus kekerasan bernuansa agama. Kalau ini dibiarkan, orang berpikir enggak ada masalah kalau mereka melakukan kekerasan," ujar Karding.

Ketua Umum PP Muhamma-

diah Din Syamsuddin mengatakan, sebenarnya secara relatif kerukunan umat beragama dapat dibangun pascakonflik bernuansa SARA di Ambon dan Poso. "Tapi, kita terentang dengan peristiwa terakibat (Insiden Cikemuh dan Temanggung). Pemerintah tak segera mengambil langkah. Sikap ini membuka peluang pada masyarakat yang berbeda aspirasi untuk mengambil jalan sendiri-sendiri," kata Din.

Menurut Karding, Kementerian Agama punya anggaran Rp 32 triliun, tetapi hanya 3 persen-4 persen saja yang dialokasikan untuk pembinaan umat.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebhinekaan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama Abdurrahman Mas'ud mengakui masih minimnya upaya pembinaan keumatan. Dia mencantumkan, sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri masih kurang. (21)

PERADILAN

Kekerasan di Pengadilan Marak

JAKARTA, KOMPAS — Aksi kekerasan di pengadilan, baik di dalam ruang sidang (*contempt in face*) maupun luar ruang sidang (*contempt ex face*), kian memprihatinkan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah diminta untuk lebih memberikan jaminan perlindungan dan keamanan di pengadilan, baik kepada hakim maupun pihak-pihak yang beracara di pengadilan.

Imbuan tersebut dikemukakan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bersama Komisi Yudisial di Jakarta, Rabu (23/2).

Berdasarkan pantauan KRHN, terdapat 30 peristiwa kekerasan di pengadilan sejak tahun 2005 hingga 2011. Kekerasan terbanyak terjadi pada 2010 (15 peristiwa), 2008 (6 peristiwa), 2009 (3 peristiwa), 2005 dan 2007 masing-masing 2 peristiwa, sementara 2006 1 peristiwa. Awal 2011 ini, tiga peristiwa kekerasan telah terjadi, antara lain di Pengadilan Negeri Parepare (Sulawesi Selatan), PN Cibinong (Jawa Barat), dan PN Tembung (Jawa Tengah).

Selain merusak gedung peng-

adilan, aksi atau bentuk kekerasan juga menimpa hakim atau aparat pengadilan lainnya. Misalnya, pengesahan majelis hakim oleh keluarga terdakwa di PN Amboi ketika majelis hakim menolak memotong ayam putih sesuai tradisi adat warga Kailolo ataupun penusukan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perkara perceraian.

Pimansyah Arklin dari KRHN mengungkapkan, kekerasan di pengadilan berpotensi terjadi di hampir semua perkara. Tidak hanya perkara pidana agama atau sengketa pemilihan kepala daerah, potensi terjadinya kekerasan juga terkandung dalam perkara-perkara privat.

Saat ini, ia menilai perlindungan dan pengamanan negara di dalam ruang sidang masih lemah. Pengamanan masih dibatasi pada kasus-kasus tertentu.

Anggota KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Suparman Marzuki, mengungkapkan, persoalan keamanan merupakan persoalan serius. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Polri untuk membicarakan hal tersebut.

Ia juga berharap pihak kepolisian bersikap lebih antisipatif dan tidak hanya menunggu datangnya permintaan pengamanan dari ketua PN. Pihak pengadilan juga harus menjalankan prosedur standar operasional (SOP) untuk mengunjung sidang dengan melakukan pemeriksaan secara ketat.

Anggota KRHN Muji Kartika Bahayu mengungkapkan, potensi kekerasan sebenarnya ada di semua pengadilan. Namun Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi ataupun Mahkamah Konstitusi relatif jarang dijadikan tempat amuk massa atas ketidakpuasan terhadap pengadilan.

Muji meneliti faktor kewibawaan pengadilan tuntut berpengaruh. "Pengadilan dengan tingkat kewibawaan yang tinggi potensi untuk mengekspresikan kekerasan lebih rendah. Karenanya, menjadi relevan ketika kami meminta KY merespons hal ini karena kekerasan ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi pengamanan saja, tetapi satu paket dengan *performance* pengadilan itu sendiri," kata Muji. (GNA)

KEAMANAN

Detasemen Antianarki Dibentuk

JAKARTA, KOMPAS — Pihak Kepolisian Negara RI segera membentuk detasemen penanggulangan anarki untuk menangani kasus-kasus kekerasan atau tindakan anarkis yang destruktif. Pembentukan detasemen itu dilatarbelakangi oleh aksi-aksi kekerasan yang terjadi pada akhir-akhir ini.

Hal itu diungkapkan Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Timor Pradopo setelah menghadiri acara serah terima jabatan Wakil Kepala Polri yang baru, yaitu Komisaris Jenderal Nanan Soekarna yang menggantikan Komisaris Jenderal Jusuf Mangabarak di Markas Besar Polri, di Jakarta, Selasa (1/3).

Menurut Timor dalam menangani berbagai persoalan keamanan dan ketertiban di masyarakat, Polri perlu melakukan terobosan yang inovatif dan kreatif setelah belajar dari kasus kekerasan di Cikeseik dan Tembung.

"Kita akan bentuk detasemen antianarki. Saya kira itu jawaban untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Cikeseik dan Tembung (kasus-kasus kekerasan)," kata Timor. Pihak Polri juga berencana melakukan simulasi detasemen tersebut.

Kinerja detasemen

Kepala Badan Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafi Amar mengatakan, detasemen penanggulangan anarki yang akan dibentuk berada di tingkat Mabes Polri.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendarli mengatakan, secara prinsip, pembentukan detasemen penanggulangan anarki perlu diapresiasi karena hal itu menunjukkan, polisi sudah banyak kekerasan bagaimana agar merupakan persoalan besar dan harus dihindari.

Akan tetapi, lanjut Hendarli, di tingkat praksis, kinerja detasemen masih perlu dilihat, apakah efektif menanggulangi kekerasan di daerah dan terintegrasi ke satuan wilayah seperti kepolisian daerah dan kepolisian resor. "Kalau tidak efektif, tentu pembentukan detasemen itu akan menghabiskan anggaran," katanya.

Menurut Hendarli, polisi sebenarnya perlu meningkatkan kinerja intelijen. "Intelijen harus memiliki peta konflik, termasuk peta konflik berbasis SARA. Dengan demikian, polisi dapat menerapkan pencegahan dini konflik sosial," katanya. (FER)

KERUSAHAN TEMANGGUNG

25 Tersangka ke Kejaksaan

SEMARANG, KOMPAS — Sebanyak 25 tersangka pelaku kerusakan Temanggung, 8 Februari lalu, diserahkan penyidik kepolisian kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Jumat (11/3). Penyerahan para tersangka setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

Para tersangka dibawa dari Markas Kepolisian Daerah Jateng ke kantor Kejati Jateng, dengan menumpang tiga bus dan sejumlah mobil mobilbus. Sebelum diserahkan kepada kejaksaan, para tersangka sempat menjalani pemeriksaan kesehatan. Di antara rombongan tersangka, terdapat tokoh ulama asal Temanggung, yakni KH Syihabuddin dan Gus Latif.

Proses penyerahan tersangka berlangsung tiga tahun. Pertama, sebanyak 13 orang menggunakan bus, disusul dua tokoh ulama. Adapun rombongan terakhir terdiri atas 10 orang.

Penyerahan para tersangka dikawal petugas dari Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polda Jateng. Penyerahan para ter-

sangka dibarengi penyerahan barang bukti aksi kerusakan. Di antaranya papan nama gereja dan papan nama PN Temanggung yang rusak, balok kayu, bukti barang-barang terbakar, pecahan kaca, alat pengeras suara, jeriken minyak, serta atribut yang dipakai perusuh saat melakukan aksi mereka.

KH Syihabuddin yang tiba di halaman kejaksaan tinggi saat ditanya wartawan hanya menjawab singkat, bahwa dirinya selama ini diperlakukan dengan baik serta kondisinya sehat. Ia tidak banyak memberi komentar ketika ditanyakan soal keterlibatannya.

50 Jaksa

Asisten Dirjen Umum Kejati Jateng, Sugeng Pujiarta, mengatakan, pihak kejaksaan telah membentuk jaksa penuntut umum sebanyak 50 orang jaksa. Tim tersebut dipimpin Wakil Kepala Kejati Jateng, Hartadi.

Setelah penyerahan tersangka ini, pihak kejaksaan menitipkan para tersangka ke ruang tahanan kepolisian, (WFO)

Berkas 25 Tersangka

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memasukkan berkas perkara 25 tersangka kasus kerusuhan di Kabupaten Temanggung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang pekan depan. Asisten Pidana Umum Kejati Jateng Sugeng Padjianto, Senin (14/3) di Semarang, menuturkan, Kejati Jateng menunjuk 50 jaksa sebagai penuntut umum. Sebanyak 23 tersangka dibuatkan berkas tersendiri dengan dakwaan melakukan pengeroyokan dan perusakan bersama serta dua tersangka lagi dikenai pasal penggerak atau memberi perintah pengeroyokan. (WHO)

Coding sheet analisis isi impartialitas pemberitaan Kasus Kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah pada *Kompas* periode Februari 2011 – Maret 2011

Media :

Judul Berita :

Tanggal :

Intercoder :

Beri tanda **X (SILANG)** pada pilihan jawaban di bawah ini!

A. Impartialitas berita diukur berdasarkan dimensi *balance* :

A.1 *Source bias* (penampilan sisi dalam pemberitaan/ tipe peliputan) :

- a. Satu sisi
- b. Dua sisi
- c. Multi sisi

A.2 *Slant* (kecenderungan berita berupa kritikan maupun pujian)

A.2.1 Kalimat kritikan

- a. Ada
- b. Tidak ada

A.2.2 Ada kalimat pujian

- a. Ada
- b. Tidak ada

A.3 Ketidakseimbangan pemberitaan (ketidak seimbangan pemberian porsi alinea dalam pemberitaan):

- a. Ada
- b. Tidak ada

B. Impartialitas berita diukur berdasarkan dimensi netralitas :

B.1 *Sensationalisme* berdasarkan:

B.1.1 Personalisasi (pandangan yang melihat individu tertentu sebagai aktor utama atau tunggal yang paling berpengaruh dalam sebuah peristiwa)

B.1.1.1 Personalisasi dari badan pemerintahan(eksekutif, legislatif, yudikatif):

- a. Ada
- b. Tidak ada

B.1.1.2 Personalisasi dari tokoh agama:

- a. Ada
- b. Tidak ada

B.1.1.3 personalisasi dari aparat keamanan :

- a. Ada
- b. Tidak ada

B.1.1.4 Ada personalisasi dari pihak lain, jika ada sebutkan...

- a. Ada
- b. Tidak ada

B.1.2 Emosionalisme (penonjolan aspek emosi (suka, benci, sedih, gembira, marah, dan sebagainya):

- a. Ada
- b. Tidak ada

B.1.3 Dramatisasi (penulisan berita yang bersifat melebih-lebihkan sebuah fakta dengan maksud menimbulkan efek dramatis):

- a. Ada
- b. Tidak ada

B.2 *Stereotype* (pemberian atribut tertentu pada individu, kelompok, atau bangsa tertentu):

- a. Ada
- b. Tidak ada

B.3 *Juxtaposition* (penyandingan dua hal berbeda atau pertentangan antara dua hal atau lebih):

- a. Ada
- b. Tidak ada

B.4 *Lingkage* (penyandingan berita berbeda dengan hubungan sebab - akibat):

- a. Ada
- b. Tidak ada

Yogyakarta

(intercoder)

INTERCODER A

SOURCE BIAS

M 32

N1 35

N2 35

CR = 64

70

CR= 0,9142

SLANT KRITIKAN

M 29

N1 35

N2 35

CR = 58

70

CR= 0,828

SLANT PUJIAN

M 31

N1 35

N2 35

CR = 62

70

CR= 0,885

KETIDAKSEIMBANGAN

M 28

N1 35

N2 35

CR = 56

70

CR= 0,8

PERSONALISASI PEMERINTAH

M 31

N1 35

N2 35

CR = 62

70

CR= 0,885

PERSONALISASI TOKOH AGAMA

M 35

N1 35

N2 35

CR = 70

70

CR= 1

PERSONALISASI APARAT KEAMANAN

M 34

N1 35

N2 35

CR = 68

70

CR= 0,971

PERSONALISASI PIHAK LAIN

M 32

N1 35

N2 35

CR = 64

70

CR= 0,914

INTERCODER A

EMOSIONALISME

M 31

N1 35

N2 35

CR = 62

70

CR= 0,885

DRAMATISASI

M 32

N1 35

N2 35

CR = 64

70

CR= 0,914

STEREOTYPE

M 29

N1 35

N2 35

CR = 58

70

CR= 0,828

JUXTAPOSITION

M 28

N1 35

N2 35

CR = 56

70

CR= 0,8

LINKAGE

M 28

N1 35

N2 35

CR = 56

70

CR= 0,8

INTERCODER B

SOURCE BIAS

M 32

N1 35

N2 35

CR = 64

70

CR= 0,9142

SLANT KRITIKAN

M 28

N1 35

N2 35

CR = 56

70

CR= 0,8

SLANT PUJIAN

M 33

N1 35

N2 35

CR = 66

70

CR= 0,942

KETIDAKSEIMBANGAN

M 29

N1 35

N2 35

CR = 58

70

CR= 0,828

PERSONALISASI PEMERINTAH

M 29

N1 35

N2 35

CR = 58

70

CR= 0,828

PERSONALISASI TOKOH AGAMA

M 35

N1 35

N2 35

CR = 70

70

CR= 1

PERSONALISASI APARAT KEAMANAN

M 34

N1 35

N2 35

CR = 68

70

CR= 0,971

PERSONALISASI PIHAK LAIN

M 33

N1 35

N2 35

CR = 66

70

CR= 0,942

INTERCODER B

EMOSIONALISME

M 30

N1 35

N2 35

CR = 60

70

CR= 0,857

DRAMATISASI

M 32

N1 35

N2 35

CR = 64

70

CR= 0,914

STEREOTYPE

M 29

N1 35

N2 35

CR = 58

70

CR= 0,828

JUXTAPOSITION

M 31

N1 35

N2 35

CR = 62

70

CR= 0,885

LINKAGE

M 28

N1 35

N2 35

CR = 56

70

CR= 0,8

12.	11/2/2011	KOMNAS Temukan Kejanggalan: Polisi Tetapkan Tersangka Insiden Cikeusik	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			2	3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
			3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
13.	11/2/2011	Kerusuhan Temanggung: Polisi Belum Temukan Ormas Perusuh	1	3	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	
			2	3	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
			3	3	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
14.	12/2/2011	Kerusuhan Temanggung: Tersangka Menjadi 14 Orang	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
			2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
			3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
15.	13/2/2011	Pengaruh Ditangkap MUI: Insiden Cikeusik Bukan Penyerangan	1	3	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	
			2	3	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2
			3	3	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
16.	14/2/2011	Kebhinekaan pun Terancam: Pemerintah Diminta Tegas Tangani Kekerasan	1	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	
			2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
			3	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
17.	14/2/2011	Pasca-Kerusuhan: Berharap Peristiwa Tragis Itu Tak Terulang Lagi	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	
			2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
			3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2
18.	16/2/2011	Presiden Ajak Hidup Rukun	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	
			2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
			3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
19.	16/2/2011	Temanggung dan Cikeusik Bertambah Satu Tersangka Lagi	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
			2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
			3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
20.	17/2/2011	Intelejen Kurang Profesional – Menteri Dalam Negeri Berdialog dengan FUI, MUI dan FPI	1	3		2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	
			2	3	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2
			3	3	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
21.	17/2/2011	Negara Lebih Perlu Proaktif: Iklim Investasi Tidak Hanya Butuh Faktor Keamanan	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	
			2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
			3	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
22.	18/2/2011	Pemerintah Harus Lebih Tegas; DPR Berdialog dengan Tokoh Lintas Agama	1	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	
			2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
			3	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
23.	18/2/2011	Membangun Toleransi	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1		

